



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury

HANDAL **Intress**

PROFIL EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Provinsi Jambi



TAHUN
2022

*new DJPb
in Town*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Profil Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Semester II Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka tugas Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-34/PB/2018 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kami menyadari bahwa Profil Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini sangat diharapkan. Dan kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah dan SKPD lingkup Kabupaten/Kota/Provinsi Jambi, BPS Provinsi Jambi, Perwakilan Bank Indonesia Jambi, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, sarana dan inspirasi dalam rangka penyusunan laporan ini, diucapkan terima kasih.

Akhir kata, kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.



Ditandatangani secara elektronik
Burhani AS



BURHANI AS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
I. Pendahuluan	4
a. Latar Belakang	4
b. Tujuan	5
c. Ruang Lingkup	5
d. Metode Pengumpulan Data	5
II. Analisis Karakteristik Ekonomi Regional	6
a. Indikator ekonomi daerah	6
b. Indikator kinerja keuangan daerah	14
c. Prospek kegiatan ekonomi unggulan	15
d. Analisis kemandirian fiskal daerah	30
e. Analisis peranan pusat di daerah	32
III. Analisis Kondisi Keuangan Regional	32
a. Penjelasan singkat APBD masing-masing Pemerintah Daerah	32
b. Perbandingan Indikator Ekonomi dan Keuangan Antar Daerah dan Pusat	33
c. Matriks perbandingan sektor ekonomi dan komoditas unggulan antar daerah	40
d. Matriks perbandingan pendapatan daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)	41
e. Matriks perbandingan belanja antar daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)	51
f. Matriks perbandingan rasio keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat	53
IV. Analisis Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah	55
a. Matriks klasifikasi dan perbandingan peraturan terkait tata kelola keuangan daerah antar daerah	55
b. Matriks perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan pusat dari peraturan pelaksanaan APBN	60
V. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah	61
a. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah antar daerah	61
b. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah dengan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPP	62
VI. Penutup	62
a. Kesimpulan	64
b. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	65

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik di pusat dan juga daerah. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah, setiap daerah telah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan hasil penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, desentralisasi fiskal berperan penting khususnya dalam mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diperlukan khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang memuat tentang azas umum keuangan daerah, struktur APBD, pertanggungjawaban APBD hingga pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun alokasi dana perimbangan. Sumber keuangan pemerintah, belanja, tantangan, dan potensi unggulan daerah serta kondisi daerah secara umum sebagaimana ditampilkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Struktur APBD secara umum terdiri dari pendapatan, belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, dan belanja hibah. Struktur/profil dari

keuangan daerah ini akan diperbandingkan antar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah disusun dengan harapan memberikan informasi pada pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi dan keuangan antar pemerintah daerah yang berada pada provinsi Jambi, serta pembelajaran pada masyarakat/*stake holders* untuk lebih peduli pada:

1. Arah rencana kerja dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan antara lain: infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan tersebut yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah Tahun 2021 adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi terkait gambaran umum fiskal atau APBD Pemerintah Daerah kepada *stakeholders*; dan
- 2) Sebagai informasi awal penyusunan kajian atau tinjauan fiskal keuangan daerah.

c. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup pembahasan yang disajikan dalam profil ekonomi dan keuangan pemerintah daerah meliputi data yang berasal dari APBD TA. 2022, 12 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kabupaten dan Kota, serta situs resmi BPK, BPKP, dan instansi pemerintah lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

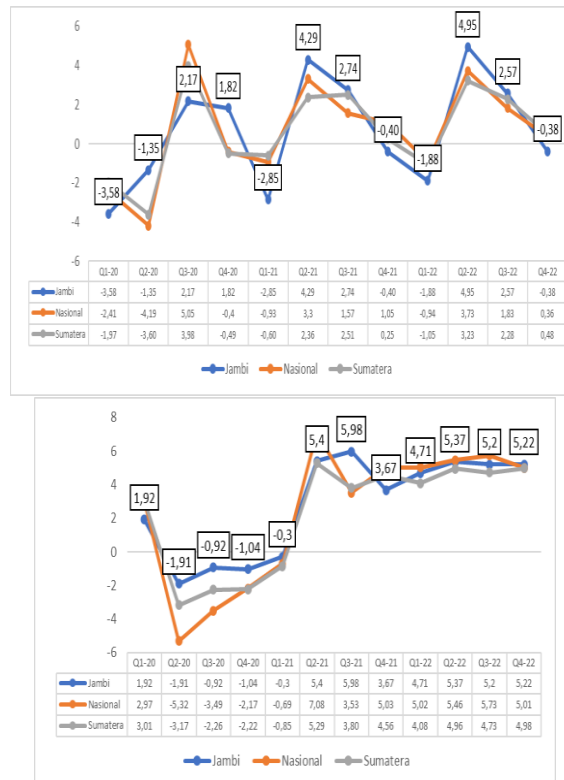
Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan Profil Keuangan Daerah Sumber Data merupakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui dialog/wawancara pada saat meminta/mendapatkan data APBD dan dokumentasi dari sumber data BPS.

II. Analisis Karakteristik Ekonomi Regional

a. Indikator ekonomi daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

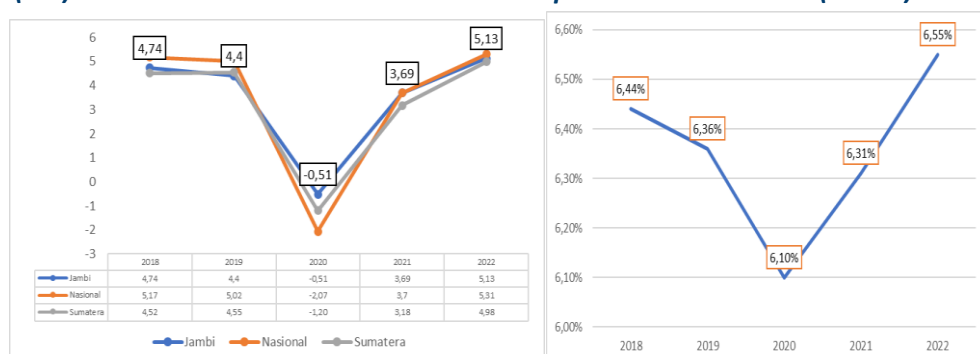
Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jambi, Kawasan Sumatera, dan Nasional secara (q-to-q) (kiri) dan (y-on-y) (kanan)



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22% (y-on-y) meskipun secara (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -0,38%. Apabila dibandingkan dengan ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (y-on-y) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera (4,98%) dan Nasional (5,01%).

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Jambi, Kawasan Sumatera, dan Nasional (c-to-c) (kiri) dan Kontribusi Ekonomi Jambi Terhadap Kawasan Sumatera (kanan)



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Perekonomian Provinsi Jambi 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp276,32 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp76,1 juta atau US\$5.125,1. Ekonomi Provinsi Jambi secara (c-to-c) tumbuh sebesar 5,13% yang terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding Kawasan Sumatera sebesar 4,98% namun lebih rendah dibanding capaian nasional sebesar 5,31%. Selain itu, Perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,55% dari total perekonomian Kawasan Sumatera. Kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi yang dapat diartikan bahwa perekonomian Jambi tumbuh lebih tinggi dibandingkan Kawasan Sumatera. Hal tersebut juga terlihat dari perbandingan angka kecondongan pertumbuhan (*slope*) antara pertumbuhan ekonomi Jambi, Kawasan Sumatera, dan Nasional selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) (c-to-c)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	3,67	5	30,99	31,56	30,25
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,02	2,13	7,82	12,28	14,21	19,29
C	Industri Pengolahan	0,12	1,27	3,05	10,73	10,24	9,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	7,08	11,66	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,98	5,13	3,15	0,15	0,14	0,13
F	Konstruksi	0,88	7,94	-0,88	8	7,89	6,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,54	5,92	5,41	12,62	12,51	12,16
H	Transportasi dan Pergudangan	-14,06	5,35	16,92	2,75	2,61	2,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,92	4,97	11,09	1,19	1,11	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	8,48	3,84	7,25	4,46	4,1	3,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	5,36	-0,72	2,63	2,58	2,33
L	Real Estate	-0,02	3,16	4,22	1,74	1,62	1,5
M,N	Jasa Perusahaan	-5,39	4,03	15,13	1,26	1,19	1,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,32	2,2	-0,65	4,85	4,31	3,59
P	Jasa Pendidikan	3,67	1,22	2,02	3,88	3,53	3,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,46	15,55	-2,4	1,37	1,43	1,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2,21	0,53	7,81	1,02	0,91	0,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		-0,51	3,69	5,13	100	100	100

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Apabila dilihat dari jenis lapangan usaha, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,92%. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut menandakan peningkatan mobilitas masyarakat yang di dorong oleh pelonggaran PPKM serta berhasilnya program vaksinasi serta naiknya permintaan akan barang komoditas yang menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga. Terjaganya daya beli masyarakat turut mendorong pertumbuhan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 15,13%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,09%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,41%. Namun terdapat beberapa lapangan usaha terkontraksi yaitu Jasa kesehatan sebesar -2,4% yang didorong oleh berhasilnya penanganan covid-19 dan lapangan usaha konstruksi sebesar -0,88% yang didorong oleh penurunan alokasi pagu belanja modal pemerintah.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir belum mengalami perubahan yang signifikan. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,25%. Sektor ini cukup stabil dan tumbuh 5% dengan didorong oleh peningkatan produksi komoditas pertanian meskipun menunjukkan sedikit penurunan *share* dibandingkan dengan tahun 2021 yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan sektor pertambangan dan gas.

Bila dikaitkan dengan transformasi struktural, maka dominasi sektor pertanian ini mengindikasikan tidak terjadinya perubahan struktur perekonomian secara ideal. Seharusnya, dengan usia Provinsi Jambi saat ini, lapangan usaha industri dan lapangan usaha lain di sektor sekunder dan tersier sudah bisa bergerak maju mendekati *share* sektor primer. Namun selama tiga tahun terakhir *share* lapangan usaha industri dan beberapa lapangan usaha lain di sektor sekunder dan tersier mengalami penurunan. Pemerintah harus lebih serius untuk memberikan dukungan baik dari sisi kemudahan perizinan, insentif fiskal yang diberikan, maupun infrastruktur yang diperlukan. Hal ini sangat penting untuk diprioritaskan untuk menarik investor ke Provinsi Jambi.

Struktur perekonomian Provinsi Jambi berbeda dengan struktur perekonomian nasional dimana secara nasional lapangan usaha industri memiliki kontribusi paling besar sebesar 18,34% dan tumbuh sebesar 4,89%. Melihat kondisi nasional yang sudah berada pada fase industrialisasi, maka Provinsi Jambi harus memulai untuk menumbuhkan usaha-usaha dalam rangka hilirisasi produk-produk lokal agar memiliki nilai tambah dan mengantisipasi kebijakan nasional yang sifatnya membatasi ekspor bahan mentah. Data Kanwil BC Sumbagtim mencatat mayoritas dari nilai ekspor merupakan komoditas bahan mentah/bahan baku, sehingga

hilirisasi menjadi sangat penting dan segera untuk dilaksanakan agar nilai tambah dari komoditas unggulan dapat menciptakan dorongan yang lebih besar bagi perekonomian, dengan tetap fokus pada sektor pertanian melalui perluasan implementasi modernisasi pertanian rakyat yang didukung oleh ketersediaan konektivitas angkutan yang handal. Implementasi modernisasi pertanian rakyat sebetulnya merupakan salah satu indikator pelaksanaan program prioritas nasional yaitu Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri Perdesaaan Dekat Perkebunan yang masih harus terus diupayakan untuk direalisasikan.

Tabel 2. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah	96.651,04	102.858,40	114.393,37	64.991,05	67.206,01	70.205,87
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.274,91	1.330,25	1.490,60	838,90	855,19	906,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.878,52	18.332,42	18.953,03	10.950,82	10.954,81	11.121,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	46.354,76	51.559,91	55.636,55	32.226,99	35.215,52	36.054,53
Perubahan Inventori	1.553,19	2.759,71	2.139,07	814,98	1.720,56	1.286,55
Ekspor Barang dan Jasa	135.816,76	153.928,09	187.805,73	101.607,31	106.328,78	110.868,20
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	94.447,18	98.704,67	104.101,98	63.075,80	68.455,37	68.726,23
Produk Domestik Regional Bruto	205.081,99	232.064,12	276.316,37	148.354,25	153.825,49	161.717,68

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Apabila dilihat dari struktur kelompok pengeluaran, perekonomian Jambi tumbuh pada semua komponen pengeluaran. Realisasi pada Komponen PK-LNPRT sebesar Rp906,94 miliar atau tumbuh 6,05%; diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang telah terealisasi sebesar Rp70.205,87 atau tumbuh sebesar 4,46%; Ekspor Barang dan Jasa yang sebesar Rp110.868,2 miliar atau tumbuh 4,27%; Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp36.054,53 miliar atau tumbuh sebesar 2,38%; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp11.121,82 miliar tumbuh sebesar 1,52%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar Rp68.726,23 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,40%.

Struktur PDRB Provinsi Jambi didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Net Ekspor. Aktivitas konsumsi rumah tangga menjadi penyangga utama perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga tumbuh di angka 4,46% seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya aktivitas ekonomi serta kebijakan penebalan bantalan perlindungan sosial dari pemerintah pusat-daerah melalui bantuan sosial dan bantuan subsidi energi mampu mempertahankan daya beli masyarakat meskipun ada tekanan dari inflasi. Dari sisi net ekspor, tumbuh sebesar 11,27% yang didorong oleh harga komoditas terjaga dengan baik serta adanya *windfall* peningkatan permintaan global akan energi yang

menjadi komoditas unggulan Jambi di pasar global seperti CPO, batubara, minyak bumi, dan gas alam. Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Konsumsi dan Aktivitas Ekspor-Impor ini memberikan sebuah risiko baru dimana pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar. Hal ini perlu disiasati oleh Pemerintah sebagai pemegang regulasi untuk dapat terus menciptakan situasi pasar yang kondusif, memberikan dukungan fasilitas-fasilitas penunjang baik distribusi, penyimpanan dan transportasi serta regulasi yang mampu menjamin kepastian birokrasi sehingga menciptakan iklim ekonomi yang kondusif serta pengawasan atas kualitas barang-barang khususnya bagi yang akan diekspor. Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengembangan lembaga penyangga pemasaran. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk stabilitas harga komoditas, yang pada akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

2. Suku Bunga

Grafik 2.3 Suku Bunga BI 7-Day Repo Rate Tahun 2020-2022



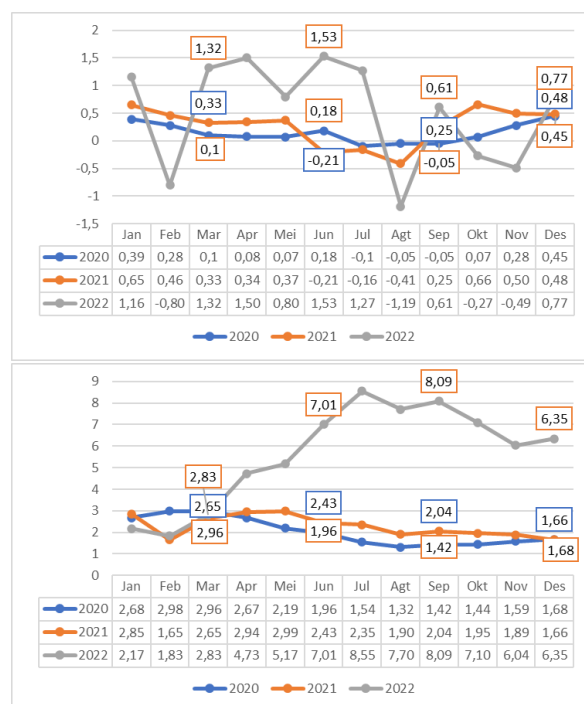
Suku bunga acuan adalah besaran bunga yang ditetapkan bank sentral setiap bulannya untuk menjadi acuan produk simpanan dan pinjaman bank serta lembaga

keuangan lainnya. Selama tahun 2022, Bank Indonesia selaku pemegang kewenangan atas kebijakan moneter cenderung menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dengan menaikkan suku bunga acuan, bunga deposito dan imbal hasil surat berharga akan naik. Harapannya, masyarakat akan memilih untuk menempatkan uangnya di bank dibandingkan menghabiskannya untuk konsumsi yang berimbas pada kurangnya peredaran uang sehingga permintaan terhadap barang menurun. Saat permintaan barang melandai, harga akan cenderung merosot. Pada akhirnya, tingkat inflasi bisa menurun. Intervensi dengan menaikkan tingkat suku bunga akan berjalan baik untuk menurunkan inflasi inti. Namun kondisi tersebut sedikit kurang ideal dengan tekanan inflasi di Provinsi Jambi yang banyak disumbang oleh komoditas makanan yang bersifat volatile. Kenaikan tingkat suku bunga sebesar 200 basis

poin dikhawatirkan akan mendorong biaya penyediaan modal yang berpotensi untuk menurunkan tingkat investasi, menurunkan tingkat konsumsi yang akhirnya dikhawatirkan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan penawaran di struktur perekonomian di Provinsi Jambi

3. Inflasi

Grafik 2. 3 Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi m-to-m (kiri) dan y-on-y (kanan) 2020-2022



Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Berdasarkan data trend, inflasi di Jambi pada tahun 2022 mencapai 6,35% (yoy) dan jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,66% (yoy). Tingkat inflasi tersebut juga lebih tinggi dibanding inflasi nasional 5,51% (yoy). Pencapaian tersebut melebihi target RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yaitu sebesar 3%. Pergerakan tingkat inflasi tahun 2022 cukup fluktuatif. Penyesuaian subsidi BBM memicu peningkatan harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, beras, dan mobil yang memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi gabungan di Provinsi Jambi. Pada bulan September, inflasi gabungan di Jambi secara yoy menyentuh angka 8,55%. Nilai tersebut merupakan inflasi tertinggi secara nasional. Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau memiliki andil yang cukup tinggi atas laju inflasi, dengan komoditas penyumbang utama yaitu bawang merah, cabai merah dan cabai rawit. Hal ini segera direspon oleh pemerintah

melalui berbagai langkah pengendalian inflasi untuk mendukung distribusi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan strategis di daerah. Beberapa bauran kebijakan untuk penanganan inflasi sebagai berikut:

1. Dari sisi kebijakan fiskal, APBN telah mengalokasikan beberapa kegiatan untuk mewujudkan terjaminnya program ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya pengelolaan sumber daya air dan lahan pertanian, peningkatan keamanan pangan, peningkatan produksi daging, hortikultura, jagung, kedelai, dan padi, peningkatan diversifikasi konsumsi pangan, subsidi/bantuan pupuk, serta asuransi pertanian. Selain itu, pemerintah melalui program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) telah mengalokasikan cadangan beras pemerintah dan cadangan stabilitas harga pangan di wilayah Jambi dengan target 19.500 ton yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh BULOG Jambi.
2. Dari sisi kebijakan fiskal daerah, APBD telah mengalokasikan beberapa kegiatan diantaranya program penyediaan pengembangan prasarana pertanian, program pengawasan keamanan pangan, program pengelolaan perikanan tangkap, program ketersediaan mutu benih/bibit, dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, bantuan alsintan, bantuan bibit, insentif dan fasilitas pelaku usaha perikanan, program pemberdayaan, penguatan produk ekonomi kreatif, UMKM, operasi pasar, pasar murah serta bantuan sosial.
3. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang ditandai dengan penandatanganan komitmen dukungan oleh seluruh Walikota dan Bupati se-Provinsi Jambi sebagai langkah yang lebih intensif agar inflasi dapat terkendali. TPID telah melaksanakan berbagai program di antaranya penyelenggaraan pasar murah dan penyerahan program sosial berupa bibit cabai dan ikan nila, alsintan dan saprodi kepada beberapa kelompok tani dan instansi.

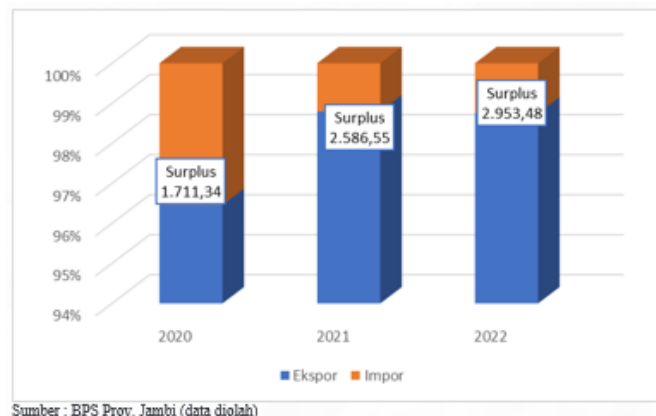
Bauran kebijakan pengendalian inflasi tersebut mampu mendorong tren penurunan harga komoditas yang secara historis memiliki andil besar terhadap inflasi di Jambi sehingga inflasi di bulan Desember secara yoy berada di 6,35%. Dengan kondisi inflasi Provinsi Jambi yang berada di atas target inflasi yang ditetapkan pada RPJMD (3%), beberapa hal utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah di tahun 2023 adalah pengendalian atas gejolak komoditas bahan makanan.

4. Nilai Tukar

Grafik 2. 4 Nilai Tukar Tahun 2022

Sumber: bi.go.id (data diolah)

Nilai tukar atau kurs, merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Pada tahun 2022, rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang dollar dan euro. Sementara apabila dibandingkan dengan mata uang dominan di Asia, rupiah pada posisi akhir tahun sedikit menguat terhadap Yen dan Yuan dibanding dengan posisi awal tahun. Nilai tukar terendah untuk rupiah (IDR) berada pada nilai Rp14.170 per USD, Rp103,25 per JPY, Rp2.112,35 per CNY, Rp14.591 per EUR, Rp184,26 per Rupee, Rp10.375 per SGD, Rp3.271,1 per MYR, dan Rp11.075 per CAD. Sementara untuk nilai tukar tertinggi berada pada nilai Rp15.769 per USD, Rp127,09 per JPY, Rp2.315,61 per CNY, Rp16.767 per EUR, Rp193,74 per Rupee, Rp11.696 per SGD, Rp3.565,63 per MYR, dan Rp11.777 per CAD. Pergerakan nilai tukar rupiah tahun 2022 cenderung melemah. Fluktuasi nilai kurs rupiah tentunya berdampak pada harga komoditas ekspor dan impor. Terdepresiasi nilai tukar rupiah dari sisi harga komoditas dalam negeri relatif akan lebih murah dibandingkan dengan dengan harga barang yang sama di luar negeri yang tentunya dapat mendorong ekspor. Disisi yang lain, terdepresiasi nilai tukar rupiah dari sisi komoditas barang luar negeri relatif akan lebih mahal.

Grafik 2. 5 Surplus Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Dampak terdepresiasi nilai tukar rupiah bagi Provinsi Jambi sejalan dengan peningkatan nilai ekspor tahun 2022 sebesar 25,19% yoy dengan realisasi US\$ 2.991,50 Juta sampai dengan Desember 2022. Ekspor Pertambangan menyumbang 62,9% dari total ekspor, Industri menyumbang 32,35%, dan Pertanian 4,75% dari total ekspor. Pangsa ekspor menurut negara tujuan utama adalah Singapura (44,71%), India (9,13%), Malaysia (8,46%), Jepang (7,79%), dan Cina (7,52%). Di sisi lain nilai impor juga naik sebesar 14,16% yoy dengan realisasi US\$ 38,02 Juta pada akhir 2022. Impor Mesin dan Alat Angkutan menyumbang 46,67% dari total impor, Bahan Kimia menyumbang 27,75%, Hasil Industri menyumbang 19,34%, dan Makanan menyumbang 5,69% dari total impor. Sehingga, nilai neraca perdagangan Jambi tahun 2022 berada pada kisaran surplus US\$ 2.953,49 Juta. Dari kondisi tersebut diatas, depresiasi nilai tukar rupiah berdampak positif pada nilai ekspor Jambi namun dari sisi impor, importasi komoditas luar negeri ke Provinsi Jambi tidak banyak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar karena sifat barang yang diimpor didominasi oleh barang pendukung produksi.

b. Indikator kinerja keuangan daerah

1. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Tabel 2. 3 Surplus/Defisit APBD Tahun 2010-2022

	2020			2021			2022			% Growth 2021-2022
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Surplus/Defisit	-1.632,93	715,88	-43,84%	-1.170,46	866,18	-74,00%	-1.715,79	762,32	-44,43%	-11,99%

Sumber : GFS, SIKD (data diolah)

Pada tahun 2022, Provinsi Jambi mengalami surplus pendapatan sebesar Rp762,32 miliar. Perkembangan surplus/defisit APBD dalam 3 tahun terakhir sangat berfluktuatif. Dapat kita lihat bahwa dalam realisasinya terjadi surplus yang semakin besar dari tahun 2020 ke tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -11,99% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Pendapatan daerah merupakan sumber ekonomi yang

dipungut oleh pemerintah daerah dari pasar, sementara belanja daerah merupakan suntikan pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian. Kondisi surplus selama tiga tahun berturut-turut memberikan sinyal bahwa porsi pendapatan daerah dalam kondisi selalu lebih besar dibandingkan dengan belanjanya dikhawatirkan mengurangi peran kebijakan fiskal daerah dalam hal ini APBD dalam mendorong sektor perekonomian. Disisi lain, APBD 2022 di wilayah Provinsi Jambi disusun ekspansif (defisit) untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian. Resiko yang mungkin timbul dari kondisi surplus tiga tahun berturut-turut adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak optimal.

2. Pembiayaan Daerah

Tabel 2.4 Pembiayaan APBD Tahun 2020 – 2022

	2020			2021			2022			% Growth 2021-2022
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Surplus/Defisit	-1.632,93	715,88	-43,84%	-1.170,46	866,18	-74,00%	-1.715,79	762,32	-44,43%	-11,99%
Pembiayaan	1.632,94	1.424,98	87,26%	1527,52	1182,08	77,39%	1231,22	1563,73	127,01%	32,29%
Penerimaan Pembiayaan (1)	1686,11	1461,98	86,71%	1556,92	1208,74	77,64%	1438,92	1780,19	123,72%	47,28%
Pengeluaran Pembiayaan (2)	53,17	37,00	69,59%	29,4	26,66	90,68%	207,7	216,46	104,22%	711,93%
SILPA	0,00	2.140,86	-	357,06	2048,26	573,65%	-484,57	2326,05	-480,02%	13,56%

Sumber : GFS, SIKD (data diolah)

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi APBD ketika terjadi defisit.

Sumber penerimaan pembiayaan sebagian besar masih mengambil dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan masih didominasi dari investasi Pemda terutama pada BUMD. Pola ini hampir sama disetiap tahun dan mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah memang menjadikan SILPA sebagai cadangan pembiayaan untuk menghadapi defisit di tahun berikutnya. Sementara investasi masih diperuntukkan sebagai tambahan modal bagi BUMD yang ada seperti Bank Jambi dan PDAM.

c. Prospek kegiatan ekonomi unggulan

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional. Arah pembangunan ekonomi mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Pembangunan adalah suatu perubahan

yang positif, yang meliputi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya di suatu daerah yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya, dan akan tercermin dari pendapatan daerah dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah di suatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) sektor-sektor ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.

Pengertian ekonomi basis di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja suatu sektor merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah: (1) perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, (2) perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, (3) perkembangan teknologi, dan (4) adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) kehabisan cadangan sumber daya.

Sedangkan sektor potensial yang ada di suatu daerah merupakan sektor yang memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama di daerah lain. Dengan demikian produk dan jasa dari sektor ekonomi potensial tersebut di samping dapat mencukupi kebutuhan sendiri juga dapat dijual ke luar sehingga daerah memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut akan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dan menggerakkan sektor potensial yang sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya sektor ekonomi yang tidak potensial, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan berkembang yang pada akhirnya masing-masing sektor ekonomi merupakan pasar bagi sektor lain. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Untuk menganalisis sektor unggulan dan sektor potensial yang ada di Provinsi Jambi pada bab ini menggunakan:

a. Analisis Location Quotient (LQ)

Hasil Analisa ini berguna untuk mengidentifikasi basis ekonomi (sektor basis) suatu wilayah. Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat

spesialisasi sektor basis atau unggulan (*leading sector*) di suatu wilayah, dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi sejenis pada lingkup yang lebih luas (regional atau nasional).

Hasil perhitungan LQ menggunakan komparasi variabel PDRB Provinsi Jambi dengan PDB Nasional tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan empat sektor yang tetap menjadi sektor basis dengan nilai $LQ > 1$. Sementara, dua sektor yang pada tahun 2017 menjadi sektor basis yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan, & jaminan sosial wajib serta sektor jasa kesehatan & kegiatan sosial bergeser menjadi sektor non basis. Empat sektor yang tetap menjadi sektor basis di tahun 2022 ini merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif, berperan sebagai penopang struktur perekonomian di Jambi dan menjadi kunci pemulihan ekonomi setelah era pandemi covid-19.

Tabel 2.5 Hasil Analisis Location Quotient – Sektor Basis Provinsi Jambi Tahun 2022

Sektor Lapangan Usaha	2017	LQ > 1	2022	LQ > 1
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,03	Basis	2,04	Basis
2. Pertambangan dan Penggalian	3,02	Basis	3,03	Basis
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,54	Basis	1,53	Basis
4. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,00	Basis	0,97	Non Basis
5. Jasa Pendidikan	1,02	Basis	1,03	Basis
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	Basis	0,97	Non Basis

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

b. Analisis Shift-Share

Untuk mengetahui keunggulan kompetitif suatu sektor baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan sektor lain dalam suatu daerah maupun dalam wilayah yang lebih luas digunakan analisis *Shift-Share*. Terdapat tiga komponen dengan informasi dasar yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

- Komponen *Regional Share*, perbandingan pertumbuhan ekonomi dari wilayah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Komponen *Propotional Share* (PS), perubahan kinerja sektor di wilayah provinsi terhadap sektor yang sama di tingkat nasional;
- Komponen *Differential Share* (DS), untuk menentukan seberapa jauh kemampuan daya saing sektor di wilayah provinsi dengan perekonomian

secara nasional. Komponen ini juga disebut komponen keunggulan kompetitif.

Analisis *Shift-Share* dapat menggambarkan kinerja masing-masing sektor pada PDRB Provinsi Jambi dibandingkan dengan PDB level nasional dengan 2017 sebagai tahun awal dan 2022 sebagai tahun akhir. Komponen yang dianalisis difokuskan pada komponen *Differential Share* (DS), hasil perhitungan menunjukkan terdapat delapan sektor dengan nilai DS positif dan sembilan sektor nilai DS negatif.

Sektor dengan nilai DS positif menunjukkan kemampuan sektor untuk bersaing dengan sektor yang sama di provinsi lain maupun secara nasional. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan sektor ini untuk terus maju dan meningkatkan produktivitasnya. Kebijakan pemerintah yang tepat serta kolaborasi yang efektif dengan pengelola sumber daya sektor ini akan meningkatkan kinerja daya saing dan perkembangan sektor kompetitif ini.

**Tabel 2.6 Hasil Analisis Shift-Share Komponen Differential Share (DS)
Provinsi Jambi Tahun 2022**

Sektor Lapangan Usaha	Nilai DS > 0
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;	3,443
2. Pertambangan dan Penggalian;	9,568
3. Pengadaan Listrik dan Gas;	20,013
4. Konstruksi;	7,552
5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;	4,210
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;	4,952
7. Real Estate;	3,706
8. Jasa Pendidikan.	3,660

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

c. Analisis Klassen Typology

Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif hasil analisis LQ dan DS kemudian diklasifikasikan menggunakan analisis *Typologi Klassen*. Analisis ini digunakan untuk memperoleh klasifikasi posisi pertumbuhan sektor sektor ekonomi wilayah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan

sektor keunggulan komparatif melalui nilai LQ dan keunggulan kompetitif melalui nilai DS.

Analisis *Typologi Klassen* dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap sektor ekonomi ke dalam empat kuadran dengan kriteria:

1. Sektor maju dan tumbuh cepat, pada kuadran I dengan nilai LQ > 1 dan nilai DS > 0;
2. Sektor potensial atau masih dapat berkembang, pada kuadran II dengan nilai LQ < 1 dan nilai DS > 0;
3. Sektor maju tapi tertekan (stagnan), pada kuadran III dengan nilai LQ > 1 dan nilai DS < 0;
4. Sektor relatif tertinggal, pada kuadran IV dengan nilai LQ < 1 dan nilai DS < 0.

Tabel 2.7 Hasil Analisis Typologi Klassen - Provinsi Jambi Tahun 2022

Location Quotient	Differential Share	
	Negatif (-)	Positif (+)
LQ > 1	▪ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;	▪ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; ▪ Pertambangan dan Penggalan; ▪ Jasa Pendidikan.
	Kuadran-III	Kuadran-I
LQ < 1	▪ Industri Pengolahan; ▪ Transportasi dan Pergudangan; ▪ Informasi dan Komunikasi; ▪ Jasa Keuangan dan Asuransi; ▪ Jasa Perusahaan; ▪ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; ▪ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; ▪ Jasa lainnya	▪ Pengadaan Listrik dan Gas; ▪ Konstruksi; ▪ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; ▪ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; ▪ Real Estate;
	Kuadran-IV	Kuadran-II

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

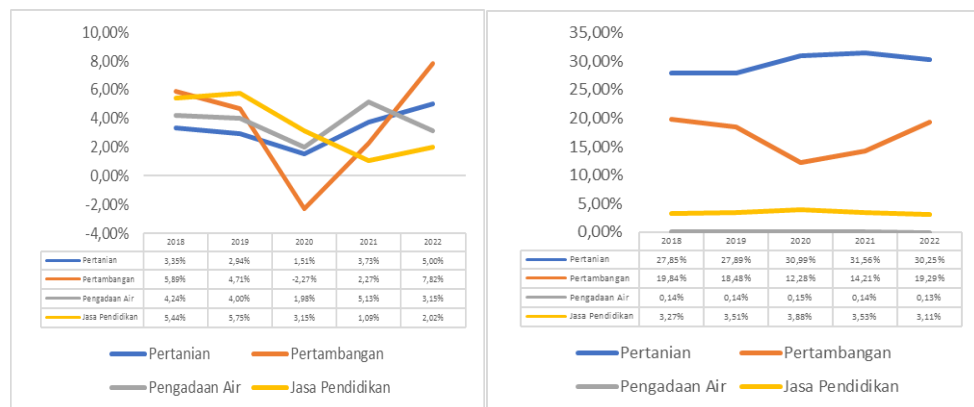
C.1. Sektor Unggulan Daerah

Kriteria sektor ekonomi unggulan yaitu dapat menunjang serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan perannya atas: (1) tingkat kemampuan sektor dalam memberi kontribusi terhadap penerimaan PDRB daerah, (2) tingkat kemampuan menyerap tenaga kerja, (3) potensi dalam menghasilkan komoditas ekspor dan (4) tingkat keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria diatas, Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & Penggalan serta Sektor Jasa Pendidikan

merupakan sektor ekonomi unggulan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ketiga sektor ini dapat maju dan tumbuh pesat dibandingkan dengan nasional. Penjelasan pada bagian selanjutnya akan lebih di fokuskan pada tiga sektor tersebut. Sementara sektor unggulan lain yaitu Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang merupakan sektor maju namun laju tumbuhnya belum setinggi pertumbuhan sektor yang sama secara nasional. Profil sektor-sektor unggulan tersebut akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan selanjutnya.

Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan (kiri) dan Kontribusi (kanan) Sektor Unggulan Provinsi Jambi 2022



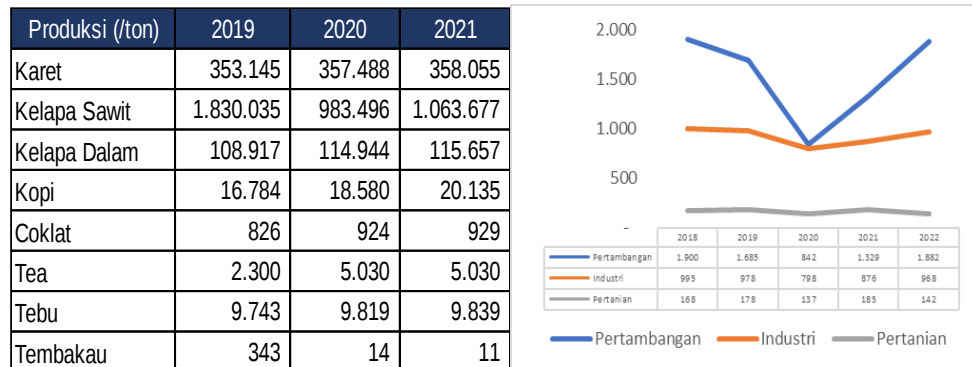
Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Dalam kurun waktu 2018-2022 kontribusi empat sektor unggulan di Provinsi Jambi atas pertumbuhan PDRB cukup stabil, dengan sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Jambi. Di awal pandemi covid-19 pada tahun 2020, ke empat sektor unggulan mengalami laju pertumbuhan negatif, bahkan sektor pertambangan mengalami laju pertumbuhan -2,27%. Namun demikian pada tahun 2021 seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional-daerah serta ditopang oleh kenaikan harga komoditas dan energi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan, dan sektor jasa pendidikan mengalami *rebound* pertumbuhan yang cukup signifikan dan berkelanjutan hingga tahun 2022.

a) Profil Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan masih merupakan sektor ekonomi unggulan secara terus menerus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian di Provinsi Jambi. Sektor pertanian, kehutanan & perikanan merupakan sektor unggulan penopang perekonomian di sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Jambi. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo dan Bungo, dengan komoditas unggulan karet, kelapa sawit, kopi, coklat, pinang, teh, dan tebu.

Gambar 2. 1 Jumlah Produksi (Ton) dan Nilai Ekspor Komoditi (Juta US\$)
Provinsi Jambi



Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalan menjadi kontributor utama pada perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur dengan hasil produk minyak dan gas bumi. Peran produk minyak dan gas bumi paling dominan di struktur ekspor produk unggulan di Jambi, dimana produk pertambangan menyumbang 62,90%, produk pertanian 4,75% dan produk industri 32,35% dari total ekspor selama tahun 2022.

Produksi produk perkebunan masih berfluktuatif tiap tahun dan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan dan peremajaan tanaman telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.

Pada sektor pengadaan air, peran pembangunan PLTA Batang Merangin yang dilakukan oleh pihak swasta secara *multiyears* tahun 2020-2025 dan proyek pengadaan sarana air bersih minum di Kota Jambi, berperan cukup besar yang menjadikan sektor ini menjadi sektor basis ekonomi dengan daya serap tenaga kerja serta nilai investasi yang ditanamkan. Sementara untuk sektor jasa pendidikan ditandai dengan mulai pulihnya aktivitas usaha bimbingan belajar, serta pertumbuhan sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan baik negeri atau swasta di Provinsi Jambi.

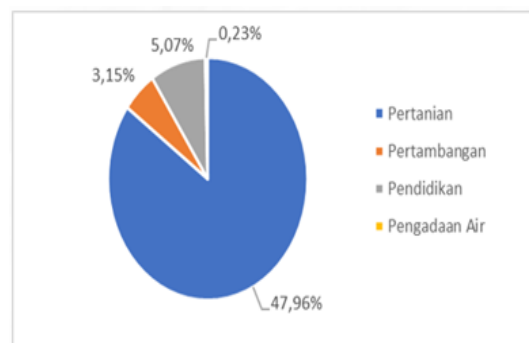
b) *Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Ketenagakerjaan*

Selain memberikan kontribusi atas pembentukan PDRB, kriteria lain dari sektor unggulan adalah kemampuannya dalam menyerap sumberdaya tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2022 lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 862 ribu orang atau 47,96% dari jumlah penduduk bekerja sebanyak 1,8 juta orang di Provinsi

Jambi. Dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian dan tumbuhnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diharapkan serapan tenaga kerja dapat mulai tumbuh kembali.

Permasalahan berulang dari sisi tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan antara lain adalah tingkat kesempatan kerja yang berkurang karena lahan pertanian yang semakin sedikit, upah yang minim, daya tawar hasil produksi rendah. Dari sisi usia rata-rata petani saat ini berusia lanjut dan berpendidikan rendah. Selain itu, pengolahan pertanian masih dilakukan secara tradisional ditambah kondisi pengairan yang kurang mendukung.

Grafik 2.8 Distribusi Tenaga Kerja Pada Sektor Unggulan



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Dengan permasalahan tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun menyerap tenaga kerja yang besar dan berkontribusi besar pada PDRB belum mampu secara optimal meningkatkan kesejahteraan petani. Perhatian khusus dari

pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani ke depan disamping mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Tabel 2.8 Penduduk Bekerja Per Kabupaten/Kota di Sektor Pertanian

Wilayah	Pertanian		
	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	768716	807654	801702
Kerinci	75854	86134	83452
Merangin	102281	99148	101353
Sarolangun	65019	63943	62016
Batanghari	55163	65206	69387
Muaro Jambi	88485	94987	96094
Tanjung Jabung Timur	80040	85310	80307
Tanjung Jabung Barat	102844	114155	110031
Tebo	105215	105734	104447
Bungo	75955	72327	73563
Kota Jambi	10326	11282	11819
Kota Sungai Penuh	7534	9428	9233

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pada sektor pertambangan distribusi tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini pada tahun 2022 adalah sebesar 3,15% atau sebanyak 56.700 orang. Efisiensi pekerja oleh pelaku usaha pada sektor ini akibat dampak pandemi tahun 2020 menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja. Prospek perekonomian dunia yang positif khususnya aktivitas negara

mitra dagang migas, diharapkan mampu menumbuhkan kembali serapan tenaga kerja pada sektor ini.

Tabel 2.9 Penduduk Bekerja per Kabupaten/Kota di Sektor Pertambangan

Wilayah	Pertambangan		
	2019	2020	2021
Provinsi Jambi	49302	70525	64211
Kerinci	1279	1115	1176
Merangin	13526	19913	18087
Sarolangun	12466	15025	15141
Batanghari	4490	3624	3698
Muaro Jambi	2366	661	2740
Tanjung Jabung Timur	173	216	0
Tanjung Jabung Barat	476	1350	649
Tebo	2177	1671	2709
Bungo	76	75	270
Kota Jambi	5447	12443	9286
Kota Sungai Penuh	6826	14432	10455

Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

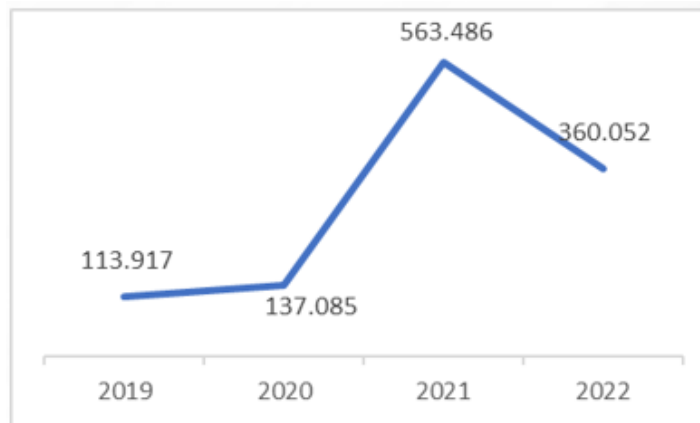
Serapan tenaga kerja terbesar pada sektor tambang batubara berada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Sementara pada sektor pertambangan migas yang antara lain di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, jumlah tenaga kerja yang diserap tidak sebesar kebutuhan tenaga kerja

pada sektor batubara. Tambang migas merupakan pekerjaan yang sarat dengan teknologi tinggi, sehingga tenaga kerja lokal sulit untuk bersaing. Kesenjangan kemampuan tenaga kerja pada sektor unggulan ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tingkat pendidikan angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jambi adalah tamat SD kebawah (lihat tabel I.4), namun kondisi ini terus membaik sehingga terjadi penurunan secara signifikan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah diiringi peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. Perbaikan kondisi ini harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan produktifitas angkatan kerja. Untuk mendorong tingkat produktifitas, maka angkatan kerja akan diarahkan kepada pendidikan vokasi, sehingga angkatan kerja yang tamat SMA/SMK akan memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih besar termasuk dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

c) Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor unggulan di Provinsi Jambi tahun 2022 yang terbesar yaitu dari sektor pertambangan sebesar Rp1.045,23 miliar, sementara dari sektor pertanian sebesar Rp25 miliar, sektor pengadaan air Rp50,51 miliar dan jasa Pendidikan sebesar Rp5,14 miliar. Sesuai dengan potensi pajak berdasarkan *tax ratio national*, kontribusi perpajakan pada sektor-sektor ini masih bisa untuk dioptimalkan.

Grafik 2.9 Bea Keluar/Pungutan Ekspor (dalam miliar rupiah)

Sumber: OM SPAN (diolah)

Mulai pulihnya perekonomian dunia khususnya pada negara mitra dagang tujuan ekspor hasil komoditas sektor unggulan dari Provinsi Jambi menambah kontribusi terhadap

pendapatan negara dan daerah. Pendapatan yang berasal dari bea keluar/pungutan ekspor cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019, tercatat sebesar Rp360.05 miliar di periode akhir tahun 2022. Kenaikan bea keluar didorong peningkatan ekspor komoditas batubara. Kenaikan produk perkebunan sawit dan kelapa yang dipengaruhi oleh naiknya harga jual CPO di pasar dunia. Selain produk sawit, peningkatan ekspor juga terjadi pada produk karet dengan negara tujuan India dan Jepang. Khusus di tahun 2022 terjadi perubahan tarif ekspor CPO mulai bulan Juni 2022 yang menyebabkan pendapatan bea keluar dari ekspor CPO mengalami penurunan.

d) Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Strategi Provinsi Jambi untuk memajukan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu: (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan; (2) Pemantapan dan Pengembangan Jalan ke Kawasan dan Jalan Produksi; (3) Pemantapan Irigasi dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi, DAK Fisik dan Dana Desa, serta dukungan pembiayaan melalui KUR.

Melalui dana dekonsentrasi Kementerian Pertanian tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp17,42 miliar untuk proyek peningkatan produksi hortikultura, padi, jagung, serta pengembangan industri berbasis perkebunan. Dukungan APBD melalui program penyediaan pengembangan sarana prasarana pertanian sebesar Rp16,77 miliar, penyediaan sarana prasarana pasca panen melalui DAK Fisik sebesar Rp23,56 miliar serta melalui Dana Desa sebesar Rp37,40 miliar untuk peningkatan usaha pertanian. Sementara dukungan pembiayaan kepada sektor pertanian, kehutanan & perikanan melalui penyaluran KUR pada tahun 2022 mencapai Rp4.757,71 miliar.

Pada sektor pendidikan melalui program prioritas peningkatan pemerataan layanan pendidikan dengan nilai mencapai Rp470,91 miliar yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan, serta bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu. Sementara dukungan pemerintah daerah sebesar Rp1,9 triliun diantaranya Rp18,5 miliar untuk program beasiswa dan alokasi DAK Fisik sebesar Rp379,89 miliar untuk pengadaan sarana prasarana pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.

e) Tantangan Fiskal Pada Sektor Unggulan Daerah

Salah satu tantangan fiskal pemerintah di Provinsi Jambi adalah dinamika harga komoditas sektor pertanian yang turut andil atas fluktuasi laju inflasi. Komoditas sektor pertanian tersebut antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit serta beras. Meskipun menjadi sektor basis, namun terdapat beberapa komoditas pangan yang memiliki ketergantungan pasokan dari daerah lain. Selain itu, produk komoditas unggulan ekspor Jambi masih dalam bentuk bahan mentah, dengan tingkat harga yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dunia, yaitu produk karet dan kelapa sawit.

Dari sisi pendapatan perpajakan, berdasar analisa *tax ratio* nasional terhadap PDRB terdapat potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan. Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain banyaknya usaha yang memiliki kegiatan ekonomi di Jambi namun NPWP tidak terdaftar di Jambi atau hanya terdaftar sebagai NPWP Cabang yang tidak memiliki kewajiban pembayaran pajak seutuhnya. Selain itu, adanya persoalan data perkebunan sawit, yang ternyata bervariasi antara satu instansi dan instansi lain di pemerintahan.

Pada sektor pertambangan, eksplorasi bahan tambang dan galian yang dilakukan di Provinsi Jambi belum berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi eksplorasi. Penerapan *good mining practise* belum banyak dilakukan oleh operator tambang, eksplorasi SDA masih berorientasi profit tanpa pertimbangan aspek sosial dan lingkungan, disisi lain potensi PAD dari sektor ini cukup besar.

f) Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Alokasi anggaran pemerintah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan saat ini masih berfokus pada sektor produksi. Sementara kebutuhan pada sektor ini adalah penciptaan atau kepastian pasar, kepastian harga serta perbaikan tata niaga bisnis dan dukungan kelembagaan. Faktor-faktor ini akan lebih memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan petani dan mendukung pengembangan sektor pertanian kedepan. Kebijakan tersebut antara lain. (1) Kepastian harga produk pertanian dengan pemanfaatan Skema

Subsidi Resi Gudang (SSRG); (2) Akselerasi belanja sektor pertanian berbasis data inflasi, ketersediaan stok pangan, harga komoditi global; dan (3) Pengembangan produksi bahan substitusi komoditi pangan, contoh: bubuk cabai dan bubuk bawang.

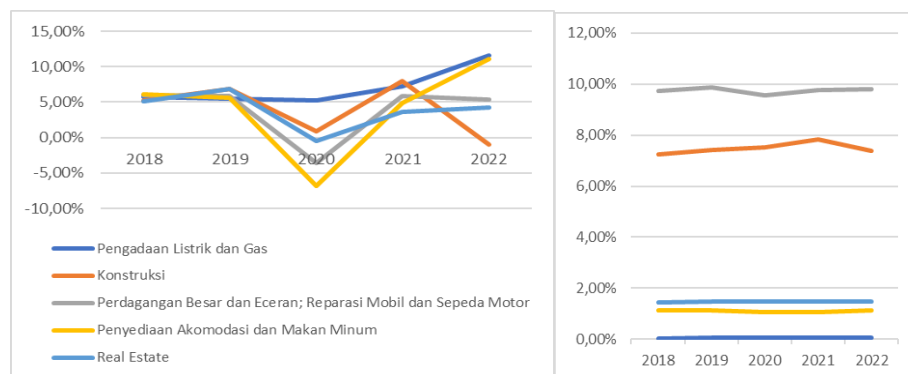
Gambar 2.2 Sektor Potensial dan Sektor Unggulan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi



C.2 Sektor Potensial Daerah

Berdasarkan hasil analisis LQ dan DS, dapat diklasifikasikan sektor potensial daerah. Sektor ini berada pada kuadran II hasil analisis *Typologi Klassen* dengan kriteria sektor potensial atau masih dapat berkembang. Sektor potensial di Provinsi Jambi berdasarkan analisis tersebut yaitu: (1) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; (2) Sektor Konstruksi; (3) Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor; (4) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta (5) Sektor *Real Estate*.

Grafik 2.10 Laju Pertumbuhan (kiri) dan Kontribusi (kanan) Sektor Potensial Provinsi Jambi Tahun 2022



Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pada grafik sebelah kanan diatas terlihat kontribusi terhadap pada PDRB Jambi selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 kelima sektor potensial tersebut cenderung stabil. Meskipun laju pertumbuhannya sempat mengalami penurunan, namun lima sektor tersebut mampu bertahan dan tumbuh kembali setelah masa pandemi covid-19 seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Pada bagian selanjutnya, analisis akan lebih difokuskan pada dua sektor potensial yang memiliki kontribusi tinggi terhadap PDRB yaitu sektor perdagangan dan konstruksi.

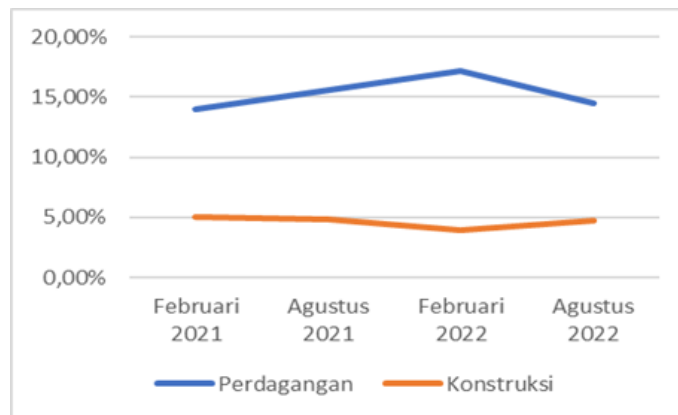
a) Profil Sektor Potensial Daerah Berdasarkan Lapangan Usaha

Kinerja Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2022 tumbuh 9,12% dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 12,90%. Termasuk kedalam tiga besar kontribusi perekonomian di Jambi setelah sektor primer pertanian dan pertambangan. Pertumbuhan kinerja sektor perdagangan disebabkan membaiknya aktivitas masyarakat seiring pelonggaran pembatasan sosial dan program vaksinasi di Provinsi Jambi. Program pemerintah melalui penyaluran berbagai Bantuan Langsung Tunai cukup berhasil menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Sementara dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian dan fasilitas sarana prasarana wilayah yang dimiliki, sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin.

Laju pertumbuhan pada Sektor Konstruksi meningkat di tahun 2021 sebesar 7,94% kemudian tumbuh negatif di periode 2022 yaitu sebesar -0,88% namun tetap memiliki kontribusi yang cukup signifikan di angka 6,72% pada perekonomian di Jambi. Karakter sektor konstruksi di Jambi masih dipengaruhi oleh faktor belanja modal pemerintah pusat dan daerah. Alokasi belanja modal di tahun 2022 menurun dibandingkan dengan alokasi tahun 2021, sehingga hal ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan sektor konstruksi. Kondisi ini selaras dengan kebijakan pemerintah di tahun 2021 yang lebih fokus pada pemulihan kondisi perekonomian melalui program pembangunan infrastruktur dan program yang bersifat padat karya. Sementara di tahun 2022 difokuskan untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan BLT.

b) Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Ketenagakerjaan

Grafik 2.11 Tenaga Kerja Sektor Potensial Provinsi Jambi



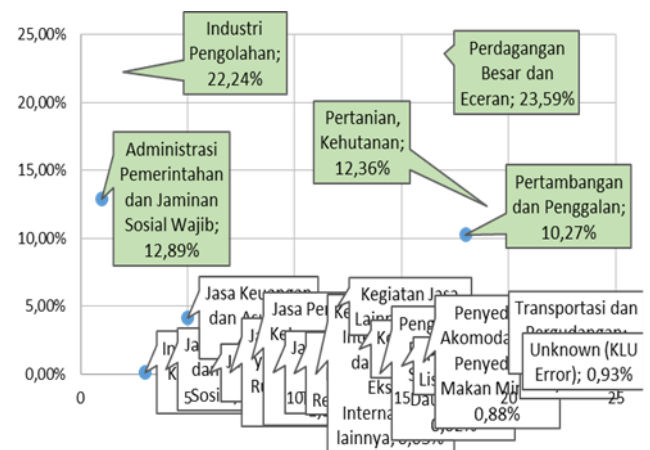
Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Serapan tenaga kerja pada sektor perdagangan pada tahun 2022 sebanyak 272 ribu orang, 14,49% dari jumlah 1,8 juta angkatan kerja di Provinsi Jambi. Terdapat efisiensi pekerja dari sektor usaha sebanyak 11 ribu orang dibandingkan tahun 2021. Pada sektor konstruksi, serapan tenaga kerja tahun 2022 sebanyak 89,3 ribu orang, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan periode tahun lalu.

c) Kontribusi Sektor Potensial Daerah Terhadap Pendapatan Negara dan Daerah

Grafik 2.12 Penerimaan Pajak Provinsi Jambi Tahun 2022

Secara umum pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3,3 triliun, komponen terbesar adalah pajak daerah. Namun di sisi lain, realisasi retribusi daerah belum optimal dengan capaian 64,9% dari target Rp134 miliar. Indikasi



penyebab rendahnya capaian retribusi daerah adalah kurang optimalnya *collecting agency*, serta penetapan target yang terlalu tinggi. Apabila dilihat dari sisi penerimaan perpajakan, Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor penyumbang pajak terbesar ketiga dari struktur penerimaan pajak per lapangan usaha tahun 2022 di Provinsi Jambi sebesar Rp868,81 miliar. Sementara penerimaan pajak dari sektor Konstruksi adalah sebesar Rp1,94 miliar. Berdasar analisa tax ratio nasional

terhadap PDRB, atas penerimaan perpajakan pada sektor ini terdapat potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan.

d) Dukungan Alokasi Anggaran APBN dan APBD

Dukungan APBN untuk mengembangkan sektor konstruksi dan perdagangan di Jambi diwujudkan pada realisasi belanja barang dan belanja modal yang cukup besar melalui belanja satker K/L. Total belanja barang terealisasi sebesar Rp2,3 triliun sementara belanja modal terealisasi sebesar Rp1,8 triliun. Belanja modal tersebut antara lain program pembangunan hunian rumah susun ASN sebesar Rp14,98 miliar, Program pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, SPAL dan SPAM sebesar Rp513,87 miliar. Pembangunan fisik sarana prasarana pendidikan sebesar Rp381,56 miliar. Program revitalisasi pasar sebesar Rp2,96 miliar. Sementara dukungan belanja barang dan belanja modal di APBD termasuk DAK Fisik yang mencapai nilai sebesar Rp4,3 triliun (belanja barang) dan sebesar Rp3,28 triliun (belanja modal) untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih dan irigasi pertanian.

e) Tantangan Fiskal Pada Sektor Potensial Daerah

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan diluar pajak, antara lain melalui peningkatan pembiayaan pada BPD, optimalisasi kontribusi BUMD dan pemanfaatan aset daerah. Namun demikian, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yaitu identifikasi terhadap potensi sumber pendapatan dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak/retribusi melalui pemanfaatan TI untuk mendukung sistem yang terintegrasi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, perbaikan layanan, kepatuhan atas peraturan serta perbaikan peraturan pajak/retribusi. Dengan demikian, basis pendapatan utama daerah dapat terus tumbuh serta berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

f) Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal yang Diperlukan

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk menggeser struktur perekonomian Provinsi Jambi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder. Sampai dengan tahun 2022, *share* perekonomian Provinsi Jambi masih di dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan. Beberapa sektor sekunder dan tersier telah menjadi sektor potensial yaitu sektor perdagangan (tersier) dan sektor konstruksi (sekunder). Namun, terdapat fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dimana dalam kurun waktu tahun 2015-2022 kontribusi industri pengolahan (sekunder) terhadap PDRB Provinsi Jambi terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya. Hal ini berarti

bahwa sektor industri pengolahan belum memperlihatkan kinerja yang baik dalam lima tahun ini. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemberian intensif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada. Dukungan kebijakan untuk percepatan perwujudan kawasan industri Kualatungkal, Ujung Jabung serta Muara Sabak harus terus dilakukan untuk mendorong sektor ini lebih berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jambi dan memberikan nilai tambah yang dapat mewujudkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jambi.

d. Analisis kemandirian fiskal daerah

Tingkat Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung bantuan dari luar termasuk Pemerintah pusat. Tingkat Kemandirian Fiskal dapat diukur menggunakan Formula Hunter (1977) yang disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia. Untuk mengukur indeks tersebut menggunakan formula sebagai berikut:

$$IKF = 1 - \frac{Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REV_{SH}}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REV_{SH}} \text{ dimana}$$

REV_{OR} adalah PAD

Tr_{GP} adalah DAU, Otsus, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah

Tr_{SP} adalah DAK Fisik dan DAK Non Fisik

B adalah Penerimaan Pinjaman Daerah

REV_{SH} adalah DBH

Hasil dari perhitungan IKF kemudian akan dikategorikan. Klasifikasi atas hasil IKF menggunakan Kategori sebagai berikut:

Tabel 2.10 Tabel Tingkat Kemandirian Fiskal

Nilai IKF	Kategori
$\geq 0,75$	Sangat Mandiri
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$< 0,25$	Belum Mandiri

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, maka diperoleh perhitungan IKF sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
REV _{OR}	2.643,43	3.268,26	3.315,15
PAD	2643,43	3.268,26	3.315,15
TR _{GP}	9.065,39	9.567,03	9.397,93
DAU	7.502,96	7.402,17	7.404,53
DID	358,08	261,84	132,49
DO	1204,35	129,05	119,65
Transfer Antar Daerah	0,00 ^{*)}	683,97	741,26
TR _{GP}	3.040,78	3.097,94	2.781,70
DAK Fisik	1049,89	110,88	992,76
DAK Non Fisik	1990,89	1984,06	1788,94
B	0,00 ^{*)}	203,89	200,35
REV _{SH}	1.781,65	2.276,75	3.154,24
DBH	1781,65	2.276,75	3.154,24
IKF	0,18	0,18	0,18
Kategori	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri

*) Data sulit untuk ditemukan namun porsinya tidak signifikan

Jika kita lihat perkembangannya dalam 3 tahun terakhir, terlihat bahwa tingkat kemandirian Pemda tidak banyak berubah. Konsistensi dalam kategori belum mandiri ini semakin menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemda terhadap Transfer dari Pusat masih sangat tinggi.

Tingkat IKF masih

berada pada 18% ini juga berarti PAD hanya cukup untuk membiayai 18% dari keseluruhan belanja daerah, sementara sisanya masih harus bergantung pada dana dari pusat. Hasil ini semakin meyakini bahwa potensi PAD, baik pajak maupun retribusi daerah masih belum optimal dikelola oleh pemerintah daerah. Permasalahan utamanya adalah Pemerintah daerah belum memiliki data pasti potensi yang ada sehingga dalam pembuatan target capaian masih dibawah/diatas potensi. Pada sisi lain, indikator capaian antara target dan realisasi selalu menjadi ukuran kinerja kepala OPD terkait. Oleh sebab itu penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar setiap rupiah dana yang ditransfer dari Pusat dapat dimanfaatkan dengan baik dan digunakan sesuai peruntukan yang tepat sesuai target dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan baik Nasional maupun Daerah. Peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah tentunya harus diikuti dengan perbaikan di berbagai lini. Disamping memperbaiki tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya sangat penting untuk membangun reputasi yang bagus di masyarakat. Apalagi berdasarkan hasil audit tahun 2021 yang lalu seluruh Pemda mendapatkan predikat WTP. Prestasi yang baik tersebut hendaknya juga diikuti dengan perbaikan bukan hanya dari sisi pertanggungjawaban keuangan tapi juga diwujudkan dalam bentuk hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing.

e. Analisis peranan pusat di daerah

Apabila dilihat dari alokasi APBN di Provinsi Jambi dan tingkat kemandirian, peranan pusat di daerah masih sangat tinggi. Alokasi pagu dana transfer masih mendominasi dari total pendapatan daerah. Hal ini kembali menandakan bahwa Provinsi Jambi masih sangat bergantung dengan Pemerintah Pusat.

III. Analisis Kondisi Keuangan Regional

a. Penjelasan singkat APBD masing-masing Pemerintah Daerah

Tabel 3. 1 I-Account APBD Tahun 2020-2022 (dalam Miliar Rupiah)

	2020			2021			2022			% Growth 21 - 22
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Pendapatan Daerah	18.786,28	16.960,18	90,28%	18.012,37	17.872,59	99,22%	17.047,47	17.993,16	105,55%	0,67%
Pendapatan Asli Daerah	2.975,69	2.643,43	88,83%	3.076,51	3.268,26	106,23%	3.248,49	3.315,55	102,06%	145%
Pendapatan Transfer	12.805,22	12.259,28	95,74%	14.400,29	14.286,49	99,2%	13.562,89	14.592,62	107,59%	2,14%
Lain-lain Pendapatan Daerah	3.005,37	2.057,47	68,46%	535,57	317,84	59,35%	236,09	84,99	36,00%	-73,26%
Belanja Daerah	20.419,22	16.244,30	79,55%	19.512,54	17.408,17	89,22%	18.763,26	17.230,84	91,83%	-1,02%
Belanja Pegawai	7.770,59	7.033,30	90,5%	7.021,81	6.567,30	93,53%	7.201,03	6.500,07	90,27%	-102%
Belanja Barang	4.160,79	3.045,24	73,19%	4.678,32	3.977,78	85,03%	4.545,47	4.356,46	95,84%	9,52%
Belanja Bunga	3,49	129	36,96%	23,14	7,76	33,54%	23,71	14,33	60,44%	84,66%
Belanja Subsidi	16,84	2184	129,69%	56,56	13,81	24,42%	12,38	14,05	113,49%	174%
Belanja Hibah	981,69	494,27	50,35%	1105,36	810,52	73,33%	650,42	413,97	63,65%	-48,93%
Belanja Bantuan Sosial	58,42	7106	12164%	73,68	49,65	67,39%	94,91	35,27	37,16%	-28,96%
Belanja Modal	4.151,64	3.052,41	73,52%	3.449,81	3.133,77	90,84%	3.190,40	3.281,49	102,86%	4,7%
Belanja Tidak Terduga	416,07	356,49	85,68%	203,97	90,09	44,17%	330,33	34,59	10,47%	-616%
Belanja Transfer	2859,68	2168,4	75,83%	2899,9	2757,48	95,09%	2.714,61	2.580,62	95,06%	-6,4%
Surplus/Defisit	-1.632,94	715,88	-43,84%	-1.500,87	804,79	-53,62%	-1.715,79	762,32	-44,43%	-5,28%
Pembiayaan	1.632,94	1.424,98	87,26%	1.527,52	1.182,08	77,39%	1.231,22	1.563,73	127,01%	32,29%
Penerimaan Pembiayaan (1)	1686,11	1461,98	86,7%	1556,92	1208,74	77,64%	1438,92	1780,19	123,72%	47,28%
Pengeluaran Pembiayaan (2)	53,17	37	69,59%	29,4	26,66	90,68%	207,70	216,46	104,22%	711,93%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	2.140,86	-	26,65	1.986,87	7455,42%	-484,57	2.326,05	-480%	17,07%

Sumber : GFS, SIKD, SIKRI, SIMTRADA (data diolah)

Sampai dengan akhir tahun 2022, Pendapatan Daerah mencapai Rp17.993,16 miliar atau terealisasi sebesar 105,5% dari pagu. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,67% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tren 3 tahun, realisasi pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.315,55 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp14.592,62 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar Rp84,99 miliar.

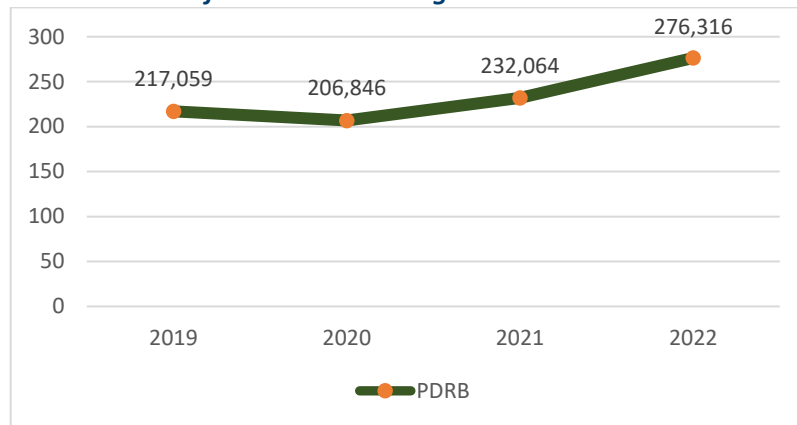
Dari sisi belanja, pagu belanja pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi sebesar Rp18.763,26 miliar dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp17.230,84 miliar atau 91,83%. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp11.334,14 miliar, Belanja Transfer sebesar Rp2.580,62 miliar, Belanja Modal Rp3.281,49 miliar dan

Belanja Tak Terduga Rp34,59 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar -1,02% dari tahun lalu. Penurunan ini berdampak signifikan karena peran belanja operasional cukup besar secara porsi.

b. Perbandingan Indikator Ekonomi dan Keuangan Antar Daerah dan Pusat

1. Produk Domestik Regional Bruto

Grafik 3. 1 Perkembangan PDRB Jambi

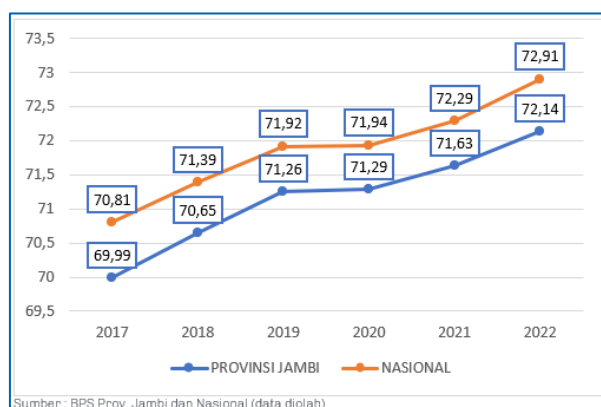


Sumber: BPS Prov. Jambi

Capaian PDRB Provinsi Jambi jika dibandingkan dengan PDB Nasional masih cukup jauh dengan tingkat kontribusi yang masih dapat dikatakan kecil. Sedangkan untuk regional Sumatera tingkat kontribusinya masih dapat dikatakan menengah dengan perbandingan yang cukup besar dari daerah lain. Dengan kata lain, peranan PDRB Provinsi Jambi dalam pembentukan PDB Nasional masih cukup kecil. Dengan mempertimbangkan potensi yang ada, maka diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan PDRB Provinsi Jambi ke depan.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Grafik 3.2 Perkembangan IPM Provinsi Jambi dan Nasional 2017 – 2022



Sumber: BPS Prov. Jambi dan Nasional (data diolah)

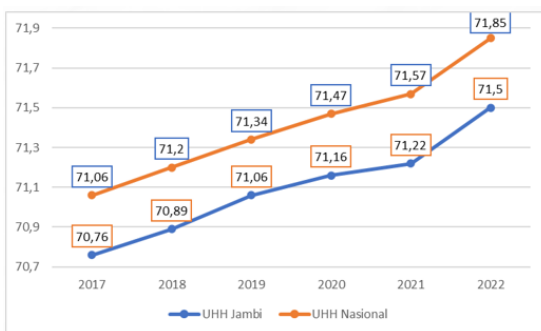
Pada tahun 2022, IPM Provinsi Jambi mencapai 72,14 atau mengalami peningkatan 0,71% dibandingkan tahun 2021. IPM berlaku sebagai ukuran kualitas hidup karena mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Pendekatan tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat,

(2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Jika kita telaah berdasarkan tiga dimensi dasar pembangunan tersebut, maka ketiga faktor sudah mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan ini masih cukup jauh dibawah IPM Nasional yang sudah mencapai 72,91. Meskipun begitu, melihat kondisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan Provinsi Jambi sudah berada pada jalur yang tepat.

Grafik 3.3 Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jambi dan Nasional 2017-2022

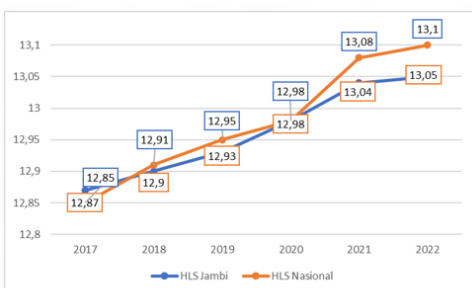


Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Indikator pertama yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,5 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir

tahun 2021. Peningkatan UHH ini juga dapat menjadi indikasi bahwa pelayanan dan penanganan proses kelahiran yang terus membaik dan juga tingkat kecukupan gizi yang juga semakin membaik dari tahun lalu.

Grafik 3.4 Harapan Lama Sekolah Jambi dan Nasional Tahun 2017-2022

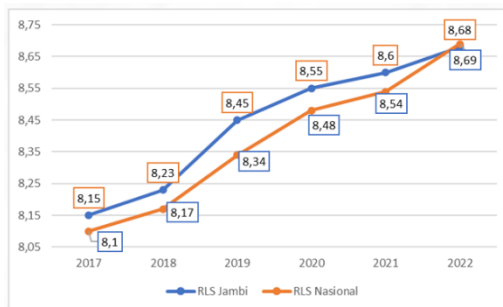


Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Sedangkan untuk indikator kedua yaitu harapan lama sekolah juga mengalami perbaikan. Anak-anak yang pada tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13,05 tahun (Diploma 1) atau meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021.

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan ditempuh oleh penduduk Jambi. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi tumbuh 0,08 dari tahun lalu.

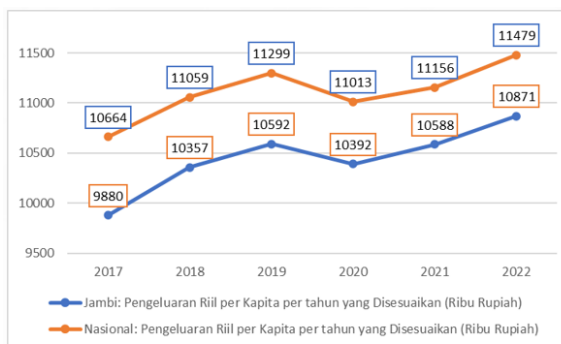
Grafik 3.5 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Jambi yang lebih baik. Pada tahun 2022, secara rata-rata penduduk Provinsi Jambi usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 8,68 tahun atau hingga kelas IX (SMP kelas III).

Grafik 3.6 Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

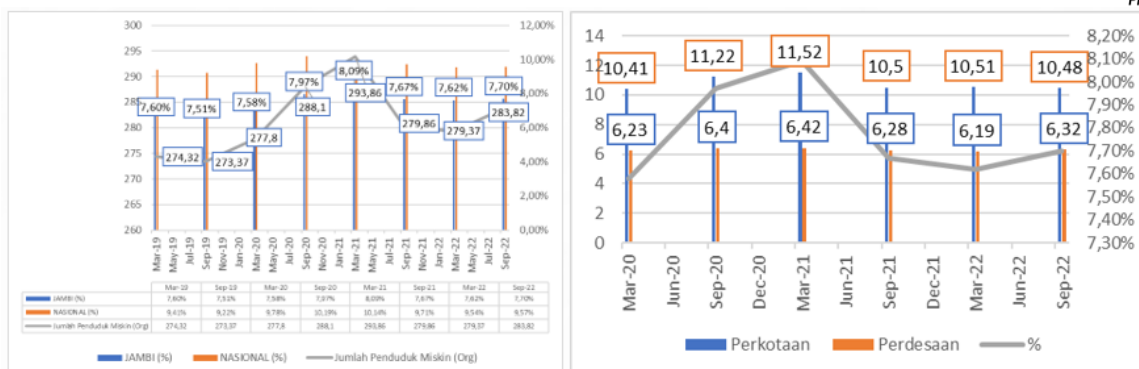
Untuk indikator terakhir yaitu standar hidup layak yang diukur menggunakan pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan pada tahun ini. Pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp10,87 juta rupiah pada tahun 2022, meningkat Rp283 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2021. Meningkatnya pendapatan

per kapita ini juga menjadi pertanda bahwa penduduk Provinsi Jambi perlahan mulai mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan meskipun dalam kondisi pandemi.

Namun demikian, peningkatan nilai IPM ini harus dipahami secara substansi. Nilai IPM yang saat ini masih menggunakan tiga indikator yang terkait dengan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak tidak menunjukkan korelasi yang positif terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dikarenakan, arah kebijakan Pemerintah tidak mengarah pada outcome dari indikator IPM namun hanya sebatas output. Tidak hanya itu, output yang dihasilkan juga belum diarahkan secara spesifik untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran namun hanya sebatas memenuhi standar persyaratan untuk dapat meningkatkan indeks IPM saja. Akibatnya peningkatan yang riil dari nilai IPM ini tidak serta merta mencerminkan kualitas masyarakat yang lebih baik meskipun terlihat baik secara angka statistika.

3. Tingkat Kemiskinan

Grafik 3.7 Perkembangan Kemiskinan Provinsi Jambi (kiri) dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah (kanan)



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2022 berada di angka 7,70%, disatu sisi melebihi target RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 7,9%, namun disisi lain tingkat kemiskinan masih dibawah target apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RKPD 2022 yaitu sebesar 7,10%.

Data sampai dengan bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi naik dari periode September 2021 menjadi sebesar 283,82 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan diantaranya terjadinya inflasi pada kelompok bahan makanan serta penyesuaian bahan bakar minyak yang mendorong tingkat garis kemiskinan per kapita dari Rp598.178,- menjadi Rp684.555,- (perkotaan) dan dari Rp479.006,- menjadi Rp541.267,- (perdesaan). Disisi lain, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2022 dibanding triwulan II 2022 yang berpengaruh pada tingkat pertumbuhan besaran upah yang diterima oleh masyarakat, meskipun terjadi peningkatan pada besaran rata-rata pengeluaran riil di tahun 2022 namun terjadi kenaikan angka rasio gini yang menyebabkan pelebaran ketimpangan tingkat kesejahteraan.

Grafik 3.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) 2019-2022



Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

kemiskinan yang sempat turun di periode September 2021. Melihat indikator-indikator tersebut, program pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang meliputi BLT, Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako/Migor cukup berhasil menahan laju pertumbuhan kemiskinan.

Beberapa bauran kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain:

1. Pemerintah Daerah:

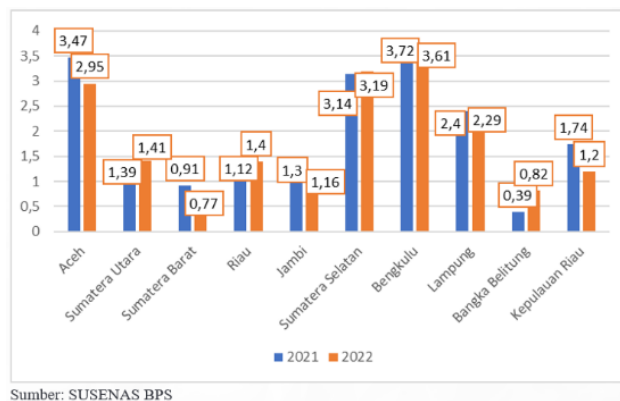
- a. Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan kepada keluarga dibawah garis kemiskinan oleh pemerintah daerah untuk 1000 KK pada 11 kab/kota;
- b. Penyaluran BLT Desa sebanyak 126.788 KPM, Bantuan Sembako 1.081.817 KPM dan BLT Migor 180.774 KPM;
- c. Penganggaran sarana penyediaan listrik dengan target 200 rumah tangga miskin;
- d. Penyediaan infrastruktur layanan dasar, antara lain: Bantuan rehabilitasi rumah di desa sebanyak 75 unit, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan melalui kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat pada 11 kab/kota, dan Jaringan SPAM sebanyak 10.517 Sambungan Rumahtangga;
- e. Penyediaan dan sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bantuan kemiskinan ekstrem.

2. Pemerintah Pusat:

- a. Penyaluran Bantuan PKH kepada 105.172 KPM dan Bantuan Subsidi Upah kepada 168.034 penerima;
- b. Penyediaan infrastruktur layanan dasar, antara lain: Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan melalui kegiatan Penyelenggaraan koordinasi satgas percepatan penurunan stunting pada 11 kab/kota;
- c. Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi, Penurunan kematian Ibu dan Bayi pada 96.922 keluarga, dan 315 fasilitas kesehatan;
- d. Pengembangan sistem penyelenggaran air minum SPAM 3.700 unit dan penyediaan sanitasi layak aman SPALD-T/S 2.000 KK;
- e. Pendataan registrasi sosial ekonomi untuk penyelenggaraan bansos/subsidi tepat sasaran.

Pemerintah tetap berupaya menyempurnakan proses pemberian bantuan-bantuan sosial tersebut untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penentuan masyarakat penerima bantuan. Selain itu, pemerintah juga perlu memfokuskan pada jenis bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu memperhatikan tipologi penduduk miskin tersebut. Untuk penduduk dengan pengeluaran jauh dibawah garis kemiskinan, program bantuan dapat difokuskan dalam bentuk bantuan-bantuan langsung (tunai dan non tunai). Namun demikian, untuk penduduk dengan pengeluaran mendekati garis kemiskinan, sebaiknya program bantuan lebih difokuskan pada bantuan-bantuan modal dan keterampilan usaha.

Grafik 3. 9 Perbandingan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2021 dan 2022



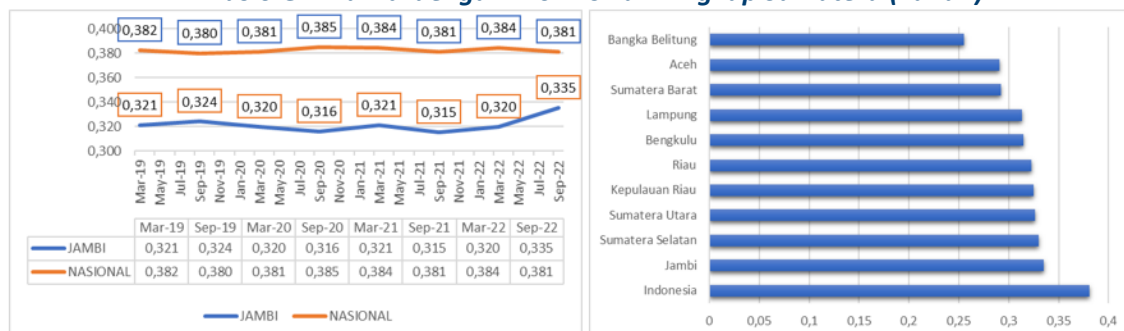
Sumber: SUSENAS BPS

Apabila dilihat lebih jauh dari sisi sudut pandang tingkat kemiskinan ekstrim, Provinsi Jambi menjadi salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dapat menekan angka kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim Provinsi Jambi berada pada angka 1,16% turun 0,14% dibanding tahun 2021.

Momentum penurunan tingkat kemiskinan ekstrim harus dijaga dengan memaksimalkan bauran kebijakan untuk mencapai target prioritas nasional 2024 bebas kemiskinan ekstrim.

4. Ketimpangan (Gini Ratio)

Grafik 3.10 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jambi 2019-2022 (kiri) dan Perbandingan Rasio Gini Jambi dengan Provinsi lain lingkup Sumatera (kanan)

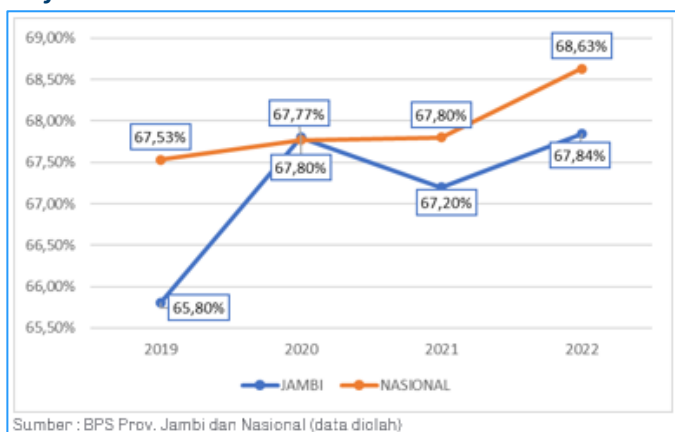


Sumber : BPS Prov. Jambi (data diolah)

Angka Gini Rasio atau tingkat ketimpangan cenderung berfluktuasi dimana periode September 2022 kembali meningkat 0,015 poin menjadi 0,335 meski sempat turun cukup tinggi pada periode Maret 2022 ke September 2022. Tingkat ketimpangan ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional (0,381) dan telah memenuhi Sasaran Indikator pembangunan Tahun 2022 (0,376-0,378) berdasarkan RPJMD namun masih dibawah target RKPD 2022 (0,321). Namun apabila dikomparasikan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera tingkat ketimpangan kesejahteraan di Provinsi Jambi relatif lebih tinggi.

5. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Grafik 3.11 TPAK Nasional dan TPAK Jambi 2022



Sumber : BPS Prov. Jambi dan Nasional (data diolah)

Indikator TPAK menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki

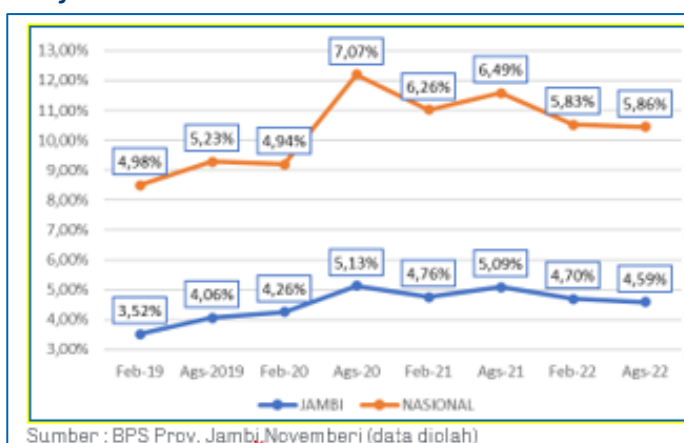
sebesar 86,17% dan TPAK perempuan sebesar 48,97%.

Grafik 3.12 Struktur Ketenagakerjaan



Dari total penduduk Jambi sebesar 3,55 juta jiwa, jumlah penduduk yang bekerja sebesar 1,8 juta. Dimana 47,96% bekerja pada sektor pertanian, kehutanan & perikanan. Sementara sektor perdagangan besar sebagai penyumbang kedua terbesar hanya menyerap tenaga kerja sebesar 14,49%. Selanjutnya yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 5,25%.

Grafik 3.13 TPT Nasional dan TPT Jambi 2022



Sumber : BPS Prov. Jambi, November (data diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menurun 0,11% menjadi 4,59% menandakan bahwa keadaan ketenagakerjaan semakin membaik seiring dengan proses pemulihan ekonomi regional meskipun relatif lambat. Jumlah pekerja yang bekerja secara

penuh atau lebih dari 35 jam dalam seminggu meningkat 108 ribu orang menjadi 1,11 juta orang dibanding periode Agustus 2021. Angkatan kerja yang semula tidak bekerja karena pandemi, sudah mulai kembali bekerja seiring pulihnya aktivitas sektor-sektor usaha.

Tabel 3.2 Data PHK Per-Sektor Usaha Tahun 2022

Sektor Usaha	s.d. Juni	s.d. Okt	s.d. Des
Perdagangan, Jasa dan Investasi	19	23	66
Keuangan	10	10	16
Pertambangan	1	1	6
Pertanian/ Perikanan	316	673	863
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	12	12	10
Aneka Sektor Industri dan Industri Dasar Kimia	3	38	108
Pendidikan	4	4	5
Lain-lain	1	1	32
Jumlah	366	762	1106

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jambi

Data dari Disnakertrans Provinsi Jambi sampai dengan bulan Desember 2022, tercatat 1.106 pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sektor penyumbang PHK terbesar adalah sektor Pertanian dan Perkebunan sebanyak 863 pekerja. PHK disektor Industri mengalami peningkatan jumlah pegawai PHK dari 38 orang (s.d. Oktober 2022) menjadi 108 orang (s.d. Desember 2022). Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat ketergantungan bahan

produksi dari sektor industri terhadap bahan baku impor yang berasal dari perdagangan global. Pemerintah pusat maupun daerah melalui berbagai bauran kebijakan terus berupaya untuk menekan angka tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan tersebut diantaranya: program padat karya, program pendidikan vokasi & pelatihan kompetensi, pengembangan kawasan industri minyak sawit (KI Kemingking), kartu pra kerja serta program-program lain yang secara langsung dan maupun tidak langsung mendorong penyerapan tenaga kerja.

Bauran kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran, antara lain:

1. Pembangunan Unit Pengolahan Minyak Sawit Industri di Perdesaan dekat Perkebunan;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada 11 kab/kota;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas Binalavotas, sebanyak 10 lembaga;
4. Pelatihan magang bidang industri di perusahaan dalam negeri;
5. Pelatihan peningkatan produktivitas bidang industri.

c. Matriks perbandingan sektor ekonomi dan komoditas unggulan antar daerah

Dari hasil klasifikasi sektoral berdasarkan nilai Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) di Provinsi Jambi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor salah satu yang merupakan sektor potensial daerah. Namun masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkannya, antara lain:

- 1) Produk lokal yang belum mampu bersain dengan produk luar.
- 2) Potensi aktivitas ekspor yang masih belum maksimal.
- 3) Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas dalam distribusi.

Untuk dapat menanggulangi berbagai tantangan dan menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian menjadi komoditas unggulan daerah, dapat dilakukan hal sebagai berikut:

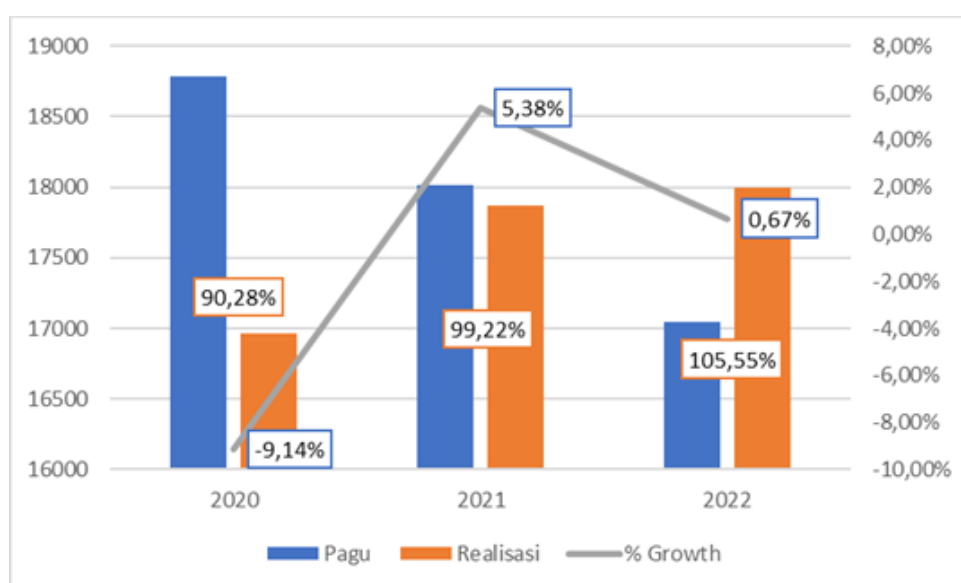
- 1) Melakukan hilirisasi produk
- 2) Membangun sarana infrastruktur, meningkatkan nilai tambah dan memperkuat jaringan informasi pasar
- 3) Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan

d. Matriks perbandingan pendapatan daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)

1) Pendapatan Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2022, Pendapatan Daerah mencapai Rp17.993,16 miliar atau terealisasi sebesar 105,5% dari pagu. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,67% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tren 3 tahun, realisasi pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.315,55 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp14.592,62 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar Rp84,99 miliar.

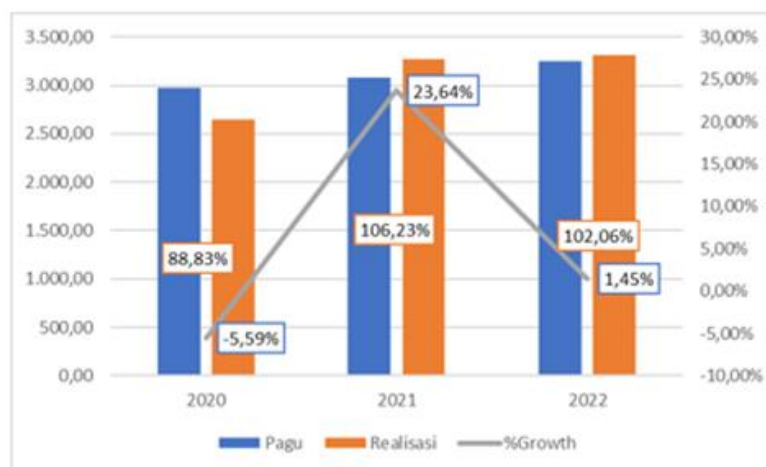
Grafik 3.14 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022



Sumber : GFS, SIKD, SIKRI, SIMTRADA (data diolah)

a) Pendapatan Asli Daerah

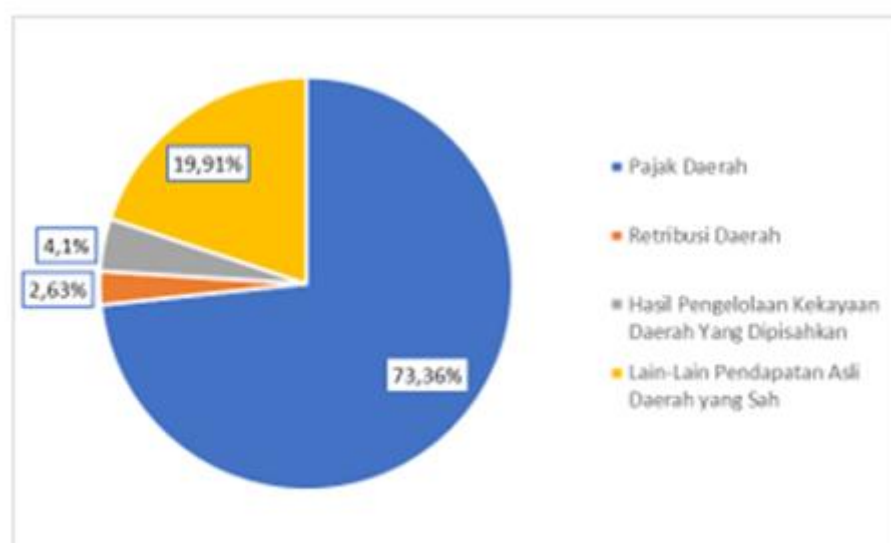
Grafik 3.15 Realisasi dan Pertumbuhan PAD Tahun 2020-2022



Sumber : GFS, SIKD (data diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sampai dengan akhir tahun 2022, PAD seluruh kabupaten dan kota di Jambi terealisasi sebesar Rp3.315,55 miliar yang terhitung 102,1% dari target atau tumbuh positif 1,45% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Grafik 3.16 Komposisi PAD tahun 2022

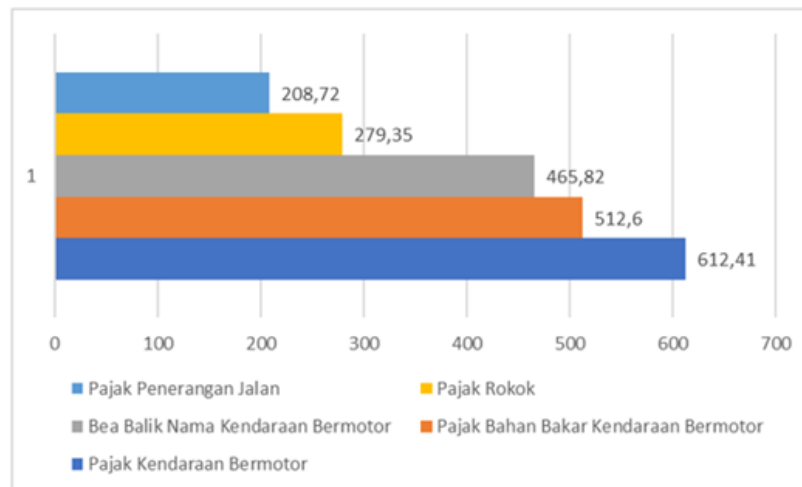


Sumber : GFS, SIKD (data diolah)

Pertumbuhan ini tidak lepas dari upaya pemda untuk terus memaksimalkan potensi penerimaan yang ada di daerah. Pajak Daerah masih mendominasi PAD dengan

porsi sebesar 73,36%. Sementara Lain-Lain PAD yang sah menempati urutan kedua dengan porsi sebesar 19,91%.

Grafik 3.17 Lima Pajak Daerah dengan Realisasi Tertinggi

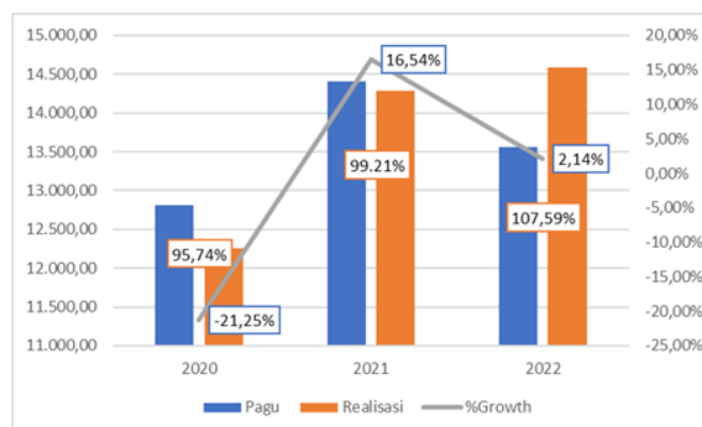


Sumber : GFS, SIKD (data diolah)

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan tersebut antara lain karena pulihnya aktifitas masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas masyarakat yang berkunjung ke tempat rekreasi serta tempat-tempat hiburan. Salah satu sumber pendapatan yang mencerminkan ini adalah dari meningkatnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Penerangan Jalan. Lima pajak tersebut berkontribusi 85,47% terhadap penerimaan PAD. Sejalan dengan menurunnya kasus covid-19 di Provinsi Jambi, meningkatnya aktifitas masyarakat ini juga memiliki dampak lanjutan. Dampak lanjutan dari peningkatan aktifitas tersebut adalah tumbuhnya tingkat hunian hotel. Tingkat hunian hotel yang tinggi juga akan berdampak langsung karena pajak hotel merupakan salah satu PAD di Provinsi Jambi.

b) Pendapatan Transfer

Grafik 3.18 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2020-2022

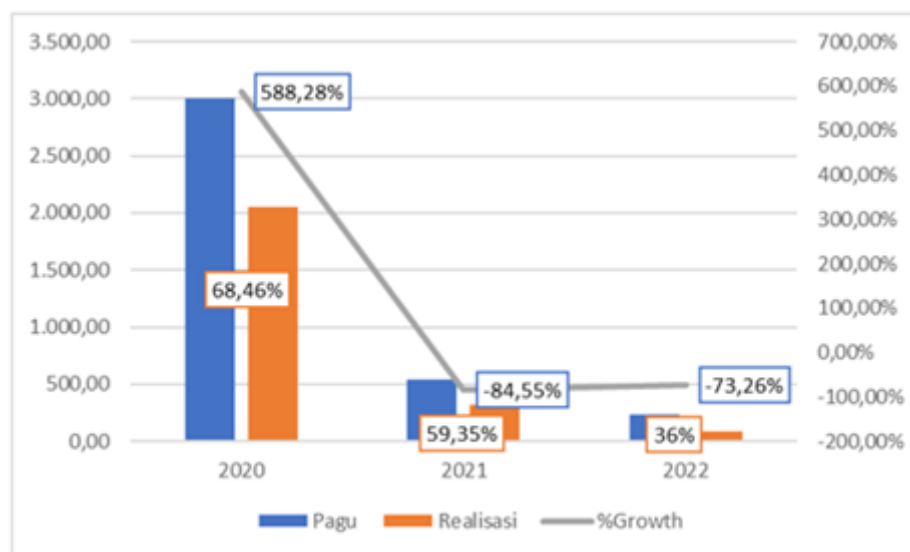


Sumber : GFS, SIKD, SIMTRADA (data diolah)

Pendapatan Transfer masih menjadi komponen yang paling besar kontribusinya kepada total Pendapatan daerah di Jambi. Pendapatan transfer pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp14.592,62 miliar atau 107,6% dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 2,14% dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Selain itu, peran pendapatan transfer masih dominan. Di tahun 2022, 81,1% pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer. Penyumbang terbesar dana transfer adalah DAU yang terealisasi sebesar Rp7.404,53 miliar atau 100% dari pagu dan DBH yang terealisasi sebesar Rp3.154,24 miliar atau 165,23% dari pagu. Hal ini menunjukkan tingginya peran pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Selain itu, DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp1.788,94 miliar atau 92,18% dan DAK Fisik terealisasi sebesar Rp992,76 miliar atau 94,22%. Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus mendorong Pemda untuk segera mengakselerasi penyerapan DAK Fisik yang telah disalurkan untuk meminimalisir idle cash, serta selalu mencatat secara regular pendapatan dan belanja pada saat transaksi rutin.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)

Grafik 3.19 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2022



Sumber : GFS, SIKD, SIMTRADA (data diolah)

Untuk periode ini, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah telah terealisasi sebesar Rp84,99 miliar atau 36% dari pagu dan tumbuh negatif -73,26% apabila dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami tren penurunan dalam tiga tahun berturut-turut, namun dampak penurunan tersebut dirasakan tidak terlalu signifikan karena kontribusinya yang rendah dalam struktur pendapatan daerah serta salah satu penyebab penurunan tersebut adalah perbaikan tata kelola administrasi penginputan data penerimaan dari LLPDyS ke pendapatan asli daerah atau pendapatan transfer.

2) Pendapatan Pemerintah Pusat

Grafik 3.20 I-Account APBN Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

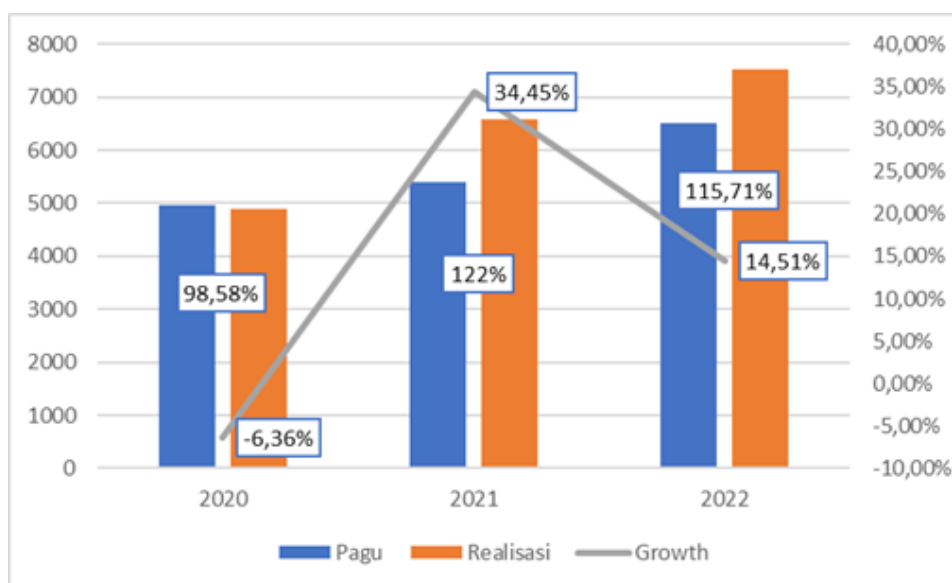
	2020			2021			2022			% Growth 2021- 2022
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	4.961,92	4.891,38	98,58%	5.390,39	6576,28	122,00%	6507,90	7530,37	115,71%	14,51%
P. Perpajakan	4.544,88	4.284,12	94,26%	5.064,88	5.850,69	115,51%	5.951,55	6.746,42	113,36%	15,31%
PNBP	47,04	607,26	145,6%	325,51	725,59	222,91%	556,35	783,95	140,91%	8,04%
BELANJA NEGARA	20.555,76	20.078,16	97,68%	21.459,81	21046,81	98,08%	20484,46	21257,57	103,77%	1,00%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	6.561,95	6.190,34	94,34%	7.105,28	6.789,06	95,55%	6.921,57	6.664,95	96,29%	-1,83%
B. Pegawai	2.504,23	2.504,60	100,0%	2.545,89	2.567,83	100,86%	2.613,80	2.578,34	98,64%	0,41%
B. Barang	2.865,14	2.595,56	90,59%	2.636,8	2.455,52	93,15%	2.440,90	2.317,21	94,93%	-5,63%
B. Modal	1.175,93	1.073,55	91,29%	1.907,6	1.749,66	91,74%	1.846,39	1.748,92	94,72%	-0,04%
B. Bansos	16,65	16,63	99,88%	16,05	16,05	100,00%	20,48	20,48	100,00%	27,60%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	13.993,81	13.887,82	99,24%	14.372,95	14.257,75	99,20%	13.562,89	14.592,62	107,59%	2,35%
Dana Alokasi Umum	7.532,46	7.502,96	99,61%	7.402,17	7.402,17	100,00%	7.404,53	7.404,53	100,00%	0,03%
Dana Bagi Hasil	1.782,94	1.781,65	99,93%	2.278,69	2.276,75	99,9%	1.908,99	3.154,24	165,23%	38,54%
Dana Transfer Khusus (DTK)	3.113,61	3.040,78	97,66%	3.208,11	3.097,94	96,57%	2.994,50	2.781,71	92,89%	-10,21%
DAK Fisik	1.100,86	1.049,89	95,37%	1.815,3	1.113,88	94,27%	1.053,71	992,76	94,22%	-10,87%
DAK Non Fisik	2.012,75	1.990,89	98,9%	2.026,58	1.984,06	97,90%	1.940,79	1.788,94	92,18%	-9,83%
Otsus, DIY, DID	358,08	358,08	100,00%	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	-49,40%
DID	358,08	358,08	100,00%	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	-49,40%
Dana Desa	1.206,72	1.204,35	99,80%	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	-0,15%
Dana Desa	1.206,72	1.204,35	99,80%	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	-0,15%
SURPLUS / DEFISIT	-15.593,84	-15.186,78	97,39%	-16.069,42	-14585,09	90,76%	-13976,56	-13727,20	98,22%	-5,88%

Sumber : OM SPAN, MEBE, KPP Lingkup Prov. Jambi, KPPBC Jambi (data diolah)

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan negara mencapai Rp7.530,37 miliar (115,71%) yang mana mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Dari sisi belanja negara, alokasi anggaran untuk Jambi yaitu sebesar Rp20.484,46 miliar yang terbagi dalam belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp6.921,57 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp13.562,89 miliar. Sedangkan Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp21.257,57 miliar atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 1% yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6.664,95 miliar, sedangkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi Rp14.592,62 miliar. Pada tahun 2022, Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendorong akselerasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Kementerian/Lembaga) dengan melakukan Evaluasi Penyerapan Anggaran secara berkala khususnya dengan 20 satuan kerja dengan pagu terbesar. Untuk lebih lengkapnya kinerja APBN adalah sebagai berikut.

a) Pendapatan Negara

Grafik 3.21 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Negara Tahun 2020-2022



Sumber : OM SPAN, MEBE, KPP Lingkup Prov. Jambi, KPPBC Jambi (data diolah)

1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Tahun 2020-2022

Jenis Pajak	2020		2021		2022	
	Pagu	Real	Pagu	Real	Pagu	Real
	4.544,88	4.284,13	5.064,88	5.850,69	5.951,55	6.746,42
PPh	1.992,26	2.001,27	2.395,70	2.297,72	2.910,52	3.235,21
PPN	1.868,50	1.966,76	2.305,91	2.745,85	2.336,47	2.920,46
PBB	210,89	120,02	205,90	147,18	311,98	152,05
Pajak Lainnya	382,70	50,09	91,45	88,27	83,82	69,73
Bea Masuk	10,97	8,85	10,17	8,18	5,83	8,51
Bea Keluar	79,55	137,08	49,46	563,49	302,93	360,05
Cukai	-	0,04	-	-	-	0,41

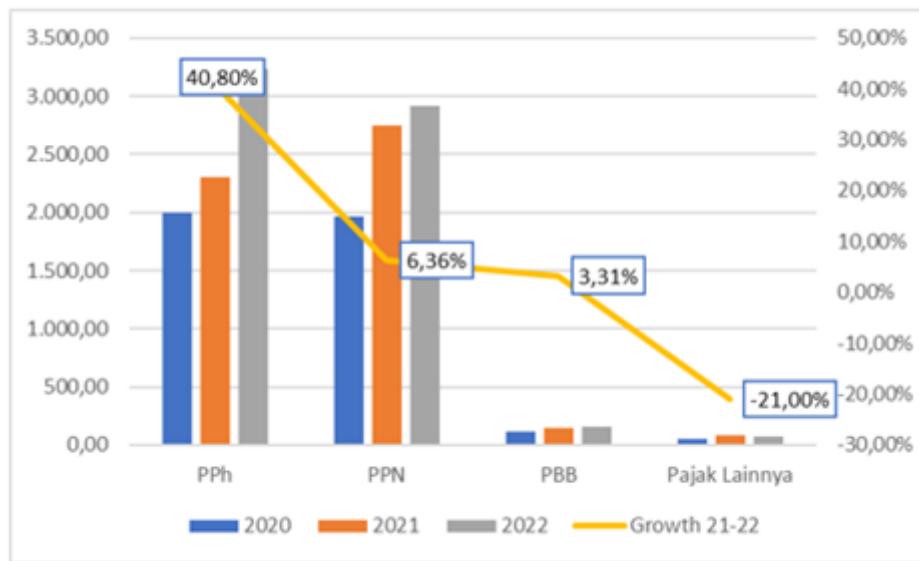
Sumber : OM SPAN (data diolah)

Pendapatan Perpajakan akhirnya mampu menorehkan prestasi yang sangat membanggakan dengan tercapainya target perpajakan di tahun 2022 Tercapainya target perpajakan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Stabilnya harga komoditas batu bara dan sawit berpengaruh terhadap kenaikan PPh Badan;
- Kenaikan harga komoditas sawit terutama produk turunannya berpengaruh terhadap kenaikan PPN Dalam Negeri;
- PMK 59 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kenaikan kontribusi pajak bendahara;

- d. Perubahan PER-07 menjadi PER-05 berpengaruh terhadap kenaikan PPh Pasal 21.

Grafik 3.22 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun 2020 – 2022

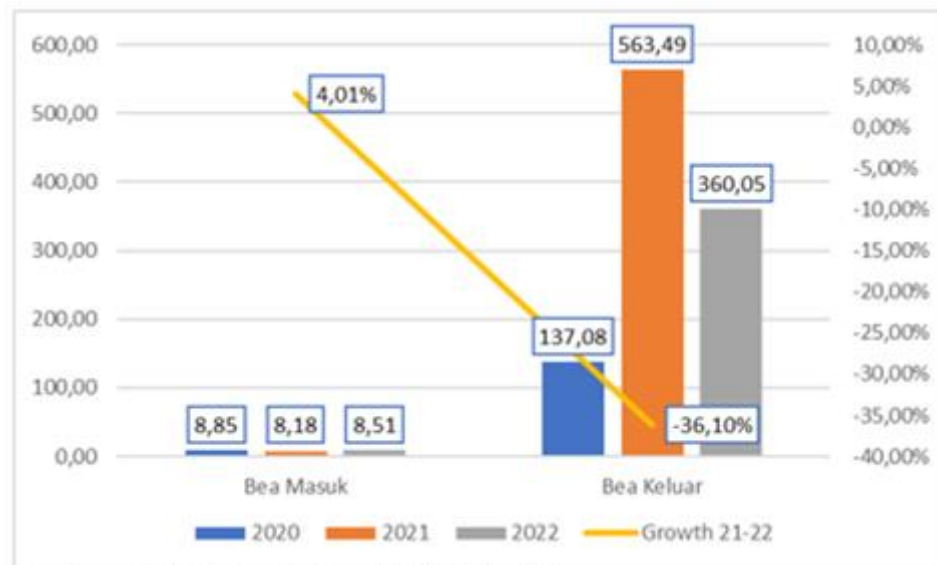


Sumber : OM SPAN (data diolah)

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2022 di Provinsi Jambi mencapai Rp6.746,42 miliar atau 113,36% dari pagu. Dilihat secara porsi, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih menjadi penopang utama penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp3.235,21 miliar (PPh) dan Rp2.920,46 miliar (PPN). Pajak Penghasilan (PPh Tahunan Badan, PPh Final, dan PPh Non Migas Lainnya) mengalami pertumbuhan yang signifikan, selain karena adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), juga dikarenakan meningkatnya daya beli aktivitas Rumah Tangga/Household yang mendukung penambahan omzet bagi Wajib Pajak Badan. PPh Final tetap tumbuh positif meskipun terdapat penambahan batasan omzet UMKM yang tidak dikenakan PPh Final sebagaimana di atur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN mengalami pertumbuhan positif yang didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah diantaranya pelaksanaan insentif pajak, harmonisasi Undang-Undang Perpajakan (kenaikan tarif PPN menjadi 11%) dan implementasi PMK 59 Tahun 2022. Peraturan Menteri tersebut mengatur transaksi perpajakan yang melibatkan Wajib Pajak Bendahara harus menggunakan NPWP Bendahara meskipun proyek dan pihak ketiga berada di luar KPP Wajib Pajak Bendahara terdaftar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, seluruh komponen penerimaan perpajakan mengalami peningkatan kecuali pada Pajak Lainnya. Apabila dilihat dari Porsi penerimaan Jenis Wajib Pajak, penerimaan perpajakan di Provinsi Jambi didominasi oleh Wajib Pajak Badan,

kemudian secara berturut-turut Wajib Pajak Rumah tangga/Orang Pribadi dan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah.

Grafik 3.23 Pertumbuhan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2020-2022

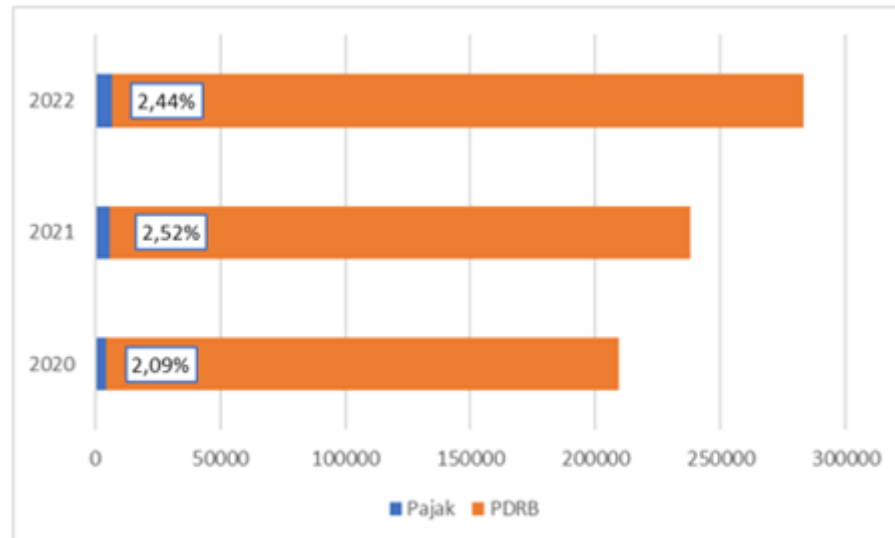


Sumber : KPPBC Provinsi Jambi (data diolah)

Nilai penerimaan Bea Masuk pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,01%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan impor semi manufaktur berupa kenaikan barang dari plastik dan kenaikan impor mesin. Namun, nilai penerimaan Bea Keluar pada tahun 2022 lebih kecil dari tahun 2021 dengan pertumbuhan negatif sebesar -36,1% (yoy), hal ini disebabkan oleh perubahan tarif preferensi CPO dan turunannya khususnya cangkang sawit, pada tahun 2021 didapat rata-rata tarif sebesar U\$23,83/MT dan pada Tahun 2022 didapat rata-rata tarif sebesar U\$8,38/MT. sehingga penerimaan Bea Keluar pada Tahun 2022 lebih kecil dari pada Tahun 2021.

Negara tujuan ekspor komoditi cangkang kelapa sawit terbesar adalah Jepang. Akibat dari kebijakan di Negara Jepang yang tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir tetapi meningkatkan jumlah pembangkit listrik yang menggunakan biomassa maka kebijakan energi Jepang menetapkan 24% pemenuhan energi di Jepang pada 2030 harus berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Pada Tahun 2023, kebutuhan cangkang sawit akan semakin meningkat karena jumlah pembangkit listrik yang menggunakan biomassa semakin bertumbuh di Jepang.

Grafik 3.24 Analisis Tax Rasio Tahun 2020-2022



Sumber : DJP, BPS (data diolah)

Rasio Pajak (*tax ratio*) merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak.

Jika dilihat dari *tax ratio*-nya, Provinsi Jambi masih sangat rendah di rentang 2% dalam 3 tahun terakhir. *Tax ratio* mengalami penurunan pada tahun 2022 ini juga salah satunya karena peningkatan yang cukup signifikan dari perolehan perpajakan itu sendiri, namun porsi nya terhadap PDRB masih cenderung sama. Rasio pajak yang masih rendah ini juga menunjukkan bahwa masih banyak potensi-potensi pajak yang belum dimaksimalkan di Provinsi Jambi. Hal itu disebabkan beberapa faktor antara lain:

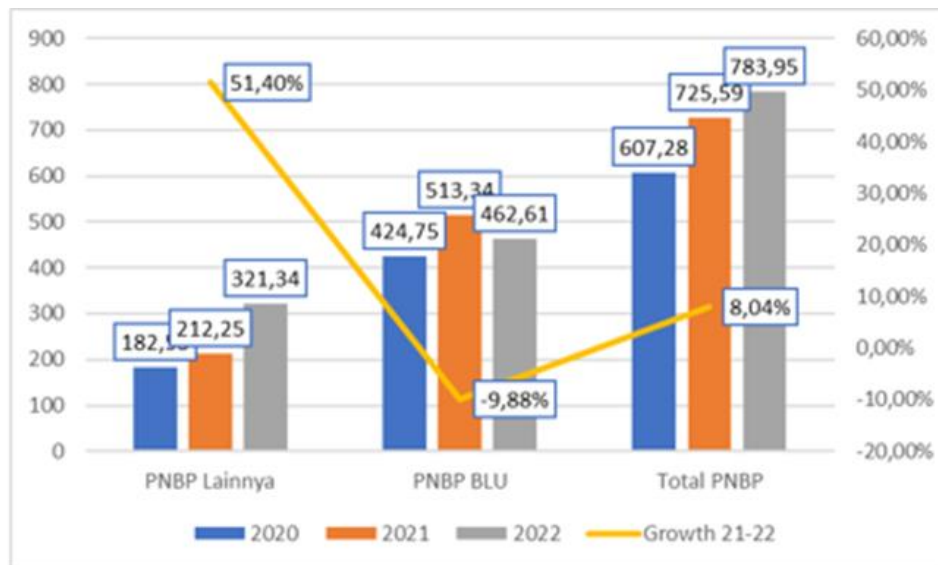
- Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak;
- Rendahnya nilai tambah dalam usaha karena kebanyakan masih berupa produk primer;
- Sulitnya akses untuk mendatangi wajib pajak;
- Kurangnya SDM dengan rasio antara account representative pajak dan wajib pajak pada rentang 1 : 100.000 hingga 1 : 120.000;
- Tingginya risiko dalam melakukan ekstensifikasi pajak bahkan tidak jarang terjadi ancaman pembunuhan dari pelaku usaha ketika dilakukan survei.

2. PNBP

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp783,95 miliar atau mencapai 140,91% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,04%. Realisasi PNBP masih didominasi oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp462,61 miliar atau 59,01% dari total penerimaan PNBP.

Pendapatan ini terutama berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang terealisasi sebesar Rp319,08 miliar. Namun, PNBP BLU tumbuh negatif sebesar -9,88% dibanding periode yang sama tahun 2021. Dari dua rumpun BLU Pendidikan dan Kesehatan, rumpun BLU Kesehatan mengalami pertumbuhan negatif karena klaim untuk program PEN klaster kesehatan menurun seiring dengan turunnya kasus covid-19.

Grafik 3.25 Realisasi PNBP Tahun 2020-2022 (dalam miliar Rupiah)



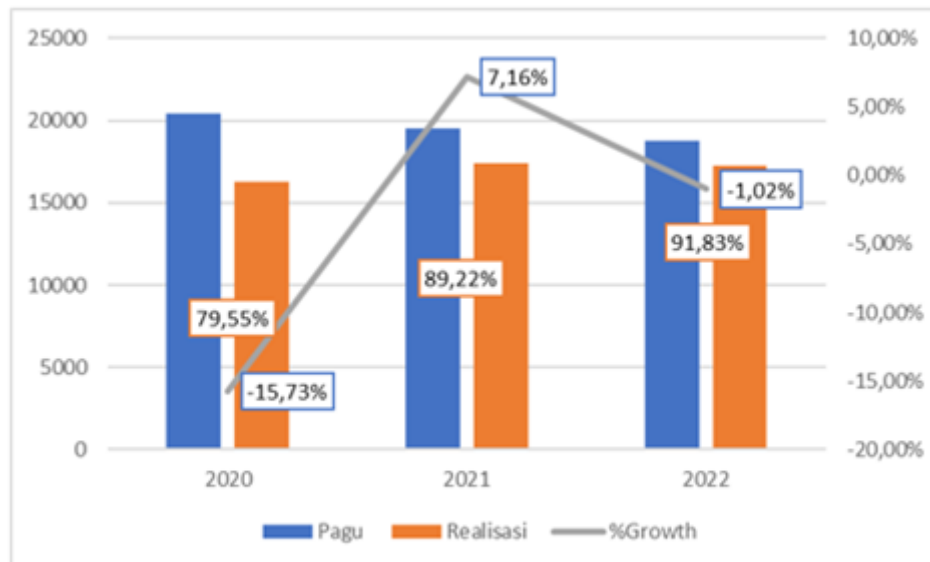
Sumber : OM SPAN (data diolah)

Sedangkan capaian untuk PNBP Lainnya telah terealisasi sebesar Rp321,34 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 51,4% dibanding periode yang sama tahun 2021. Peningkatan ini juga menjadi cermin stabilnya aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi. Tiga sektor terbesar PNBP Lainnya adalah dari peningkatan aktivitas Jasa Kendaraan (STNK, TNKB), Aktivitas Pelabuhan dan Penerbitan Paspor yang mencerminkan peningkatan aktivitas masyarakat di sektor Transportasi.

- e. Matriks perbandingan belanja antar daerah dan pusat (Alokasi dan realisasi tahun lalu dan tahun berjalan)

1) Belanja Daerah

Grafik 3.26 Realisasi dan PERTumbuhan Belanja Tahun 2020-2022



Sumber : GFS, SIKD, SIMTRADA (data diolah)

Dari sisi belanja, pagu belanja pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi sebesar Rp18.763,26 miliar dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp17.230,84 miliar atau 91,83%. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp11.334,14 miliar, Belanja Transfer sebesar Rp2.580,62 miliar, Belanja Modal Rp3.281,49 miliar dan Belanja Tak Terduga Rp34,59 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar -1,02% dari tahun lalu. Penurunan ini berdampak signifikan karena peran belanja operasional cukup besar secara porsi.

2) Belanja Negara
a. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

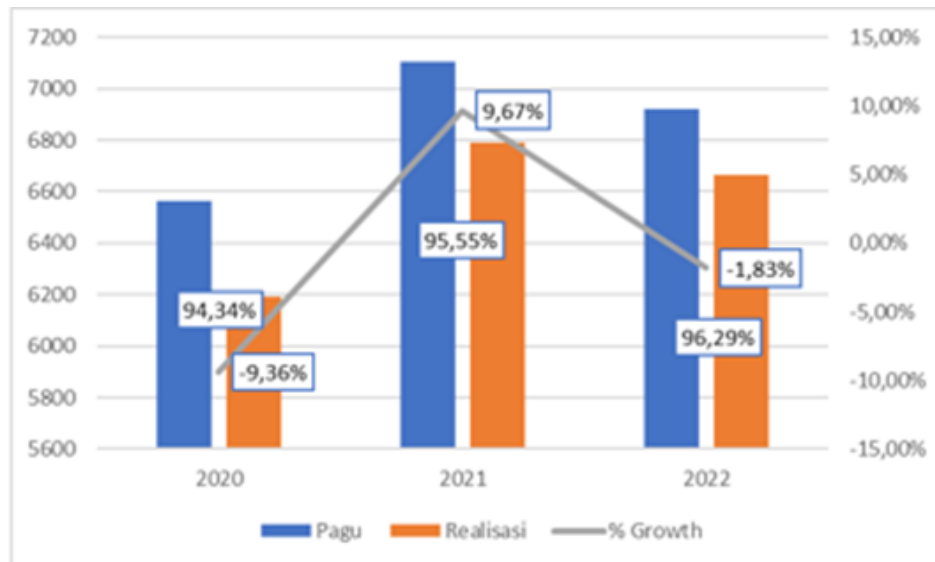
Tabel 3.3 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 – 2022 (dalam Miliar Rupiah)

	2020			2021			2022			%Growth 2020 - 2021
	Pagu	Real	%Real	Pagu	Real	%Real	Pagu	Real	%Real	
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	8.681,86	8.190,34	94,34%	7.105,28	6.788,08	95,66%	8.821,67	8.884,86	99,29%	-1,83%
B. Pegawai	2.504,23	2.504,60	100,0%	2.545,89	2.567,83	100,86%	2.658,80	2.578,34	96,94%	0,49%
B. Barang	2.865,11	2.895,56	100,99%	2.636,81	2.455,52	93,16%	2.440,90	2.317,21	94,93%	-6,83%
B. Modal	1.75,99	1.073,55	91,29%	1.907,16	1.749,66	91,74%	1.846,39	1.748,92	94,72%	-0,04%
B. Lainnya	1.65	1,63	98,88%	1,05	1,05	100,00%	20,48	20,48	100,00%	27,80%

Sumber : OM SPAN, MESE (data diolah)

Pada tahun 2022, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp6.664.95 miliar atau 96,29% dari total pagu belanja. Pada periode ini, realisasi Belanja Pegawai 98,64%, Belanja Barang 94,93%, Belanja Bantuan Sosial 100%, dan Belanja Modal 94,72%.

Grafik 3.27 Realisasi dan Pertumbuhan BPP Tahun 2020-2022



Sumber : OMS PAN (data diolah)

Secara keseluruhan, Belanja K/L mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,83% apabila dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Terkontraksinya realisasi BPP disebabkan oleh penurunan realisasi belanja modal dan belanja barang. Selain itu, Untuk tahun 2022 Pagu Anggaran mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,59%, dimana berdasarkan besaran penurunan pagu K/L, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami penurunan Pagu Anggaran sebesar Rp510,98 miliar dan Kementerian Agama mengalami penurunan pagu sebesar Rp134,17 miliar. Sementara itu, K/L yang mengalami kenaikan pagu anggaran adalah Kepolisian Negara RI naik sebesar Rp207,79 miliar dan Badan Pusat Statistik naik sebesar Rp94,79 miliar.

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Tabel 3.4 Perkembangan TKDD Tahun 2020-2022

	2020			2021			2022			% Growth 21 - 22
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	13.993,81	13.887,82	99,24%	14.372,95	14.257,75	99,20%	13.562,89	14.592,62	107,59%	2,35%
Dana Transfer Umum (DTU)	9.315,40	9.284,61	80,54%	9.680,86	9.678,92	76,46%	9.313,52	10.558,77	113,37%	9,09%
Dana Alokasi Umum	7.532,46	7.502,96	99,6%	7.402,17	7.402,17	100,00%	7.404,53	7.404,53	100,00%	0,03%
Dana Bagi Hasil	1.782,94	1.781,65	99,93%	2.278,69	2.276,75	99,9%	1.908,99	3.154,24	165,23%	38,54%
Dana Transfer Khusus (DTK)	3.113,61	3.040,78	97,66%	3.208,11	3.097,94	96,57%	2.994,50	2.781,70	92,89%	-10,21%
DAK Fisik	1.100,86	1.049,89	95,37%	1.181,53	1.113,88	94,27%	1.053,71	992,76	94,22%	-10,87%
DAK Non Fisik	2.012,75	1.990,89	98,9%	2.026,68	1.984,06	97,90%	1.940,79	1.788,94	92,18%	-9,83%
Otsus, DIY, DID	358,08	358,08	100,00%	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	-49,40%
DID	358,08	358,08	100,00%	261,84	261,84	100,00%	132,49	132,49	100,00%	-49,40%
Dana Desa	1.206,72	1.204,35	99,80%	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	-8,15%
Dana Desa	1.206,72	1.204,35	99,80%	1.222,14	1.219,05	99,75%	1.122,38	1.119,65	99,76%	-8,15%

Sumber : OM SPAN, SIKD, MEBE (data diolah)

Pada tahun 2022, TKDD telah terealisasi sebesar Rp14.592,62 miliar atau 107,59% dari pagu dengan pertumbuhan 2,35%, Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar 38,54% dengan Realisasi 165,23% dari pagu.

3) Matriks perbandingan rasio keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Laporan konsolidasian tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Laporan Konsolidasian Pemerintah Tahun 2020 – 2022

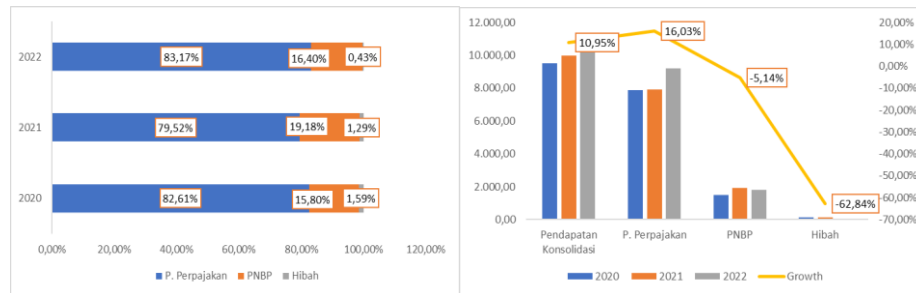
	2020		2021		2022		Growth
	Real	Proporsi	Real	Proporsi	Real	Proporsi	
Pendapatan Konsolidasi	9.520,90		9.973,16		11.065,03		10,95%
P. Perpajakan	7.864,90	82,61%	7.931,13	79,52%	9.202,49	83,17%	16,03%
PNBP	1.504,41	15,80%	1.912,94	19,18%	1.814,57	16,40%	-5,14%
Hibah	151,59	1,59%	129,1	1,29%	47,97	0,43%	-62,84%
Belanja Konsolidasi	24.045,94		25.952,61		24.986,23		-3,72%
Belanja Pemerintah	20.360,30	84,67%	23.753,46	91,53%	22.536,77	90,20%	-5,12%
Transfer	3.685,64	15,33%	2.199,15	8,47%	2.449,46	9,80%	11,38%
Surplus/Defisit	-14.525,04		-15.979,44		-13.921,20		-12,88%
Pembiayaan	1.424,98		1.182,07		2.029,63		71,70%
Penerimaan Pembiayaan	1.461,98	102,60%	1.208,74	102,26%	2.256,23	111,16%	86,66%
Pengeluaran Pembiayaan	37	2,60%	26,66	2,26%	226,6	11,16%	749,96%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	-13.100,06		-14.797,37		-11.891,57		-19,64%

Sumber : GFS, SIKRI (data diolah)

1) Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Grafik 3.28 Perbandingan Komposisi dan Pertumbuhan Pendapatan Konsolidasian

Tahun 2020-2022



Sumber : GFS, SIKRI (data diolah)

Pada tahun 2022, pendapatan konsolidasian terealisasi sebesar Rp11.065,03 miliar yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp9.202,49 miliar, PNBP sebesar Rp1.814,57 miliar dan hibah sebesar Rp47,97 miliar. Pendapatan konsolidasian mengalami pertumbuhan positif 10,95% dibanding tahun 2021.

Jika lihat perbandingan pada 3 tahun terakhir, terlihat komposisi terbesar masih didominasi dari sektor perpajakan. Pada tahun 2022, perpajakan menyumbang 83,17% dari total pendapatan konsolidasi. Perpajakan mengalami pertumbuhan 16,03% dibanding tahun 2021 hal ini salah satunya dikarenakan karena adanya kelonggaran aktifitas di masa pasca pandemi. Raminya sektor kuliner yang ditandai ramainya kunjungan restoran dan rumah makan serta cafe termasuk hotel. Dan juga sektor pariwisata yang ditandai dari peningkatan kunjungan ke tempat-tempat wisata.

2) Analisis Tax Ratio

Tabel 3.6 Tax Ratio Konsolidasian Tahun 2020-2022

Tahun	Penerimaan Perpajakan	PDRB ADHB	Rasio
2020	7.864,90	205.082,00	3,84%
2021	7.931,13	232.064,12	3,42%
2022	9.202,49	276.316,37	3,33%

Sumber : GFS, SIKRI, BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Jika kita lihat *tax ratio* pada tahun ini sedikit menurun dari tahun lalu. Namun jika kita lihat pada scope yang lebih besar, terlihat bahwa *tax ratio* tidak banyak berubah. Bahkan *ratio* ini tidak hanya bertahan 3 tahun ini saja tapi juga untuk tahun-tahun sebelumnya. Stagnasi *ratio* perpajakan ini menunjukkan bahwa kondisi perpajakan di Provinsi Jambi tidak banyak mengalami perkembangan. Hal ini juga disebabkan oleh struktur perekonomian Jambi yang masih didominasi oleh sektor primer dimana pada sektor tersebut basis perpajakan relatif rendah, sektor informal relatif besar, serta jalur distribusi perdagangan yang masih konvensional.

3) Analisis Peran Pendapatan terhadap PDRB

Tabel 3.7 Perkembangan Peran Belanja Konsolidasian Terhadap PDRB

Tahun	Belanja Konsolidasi	PDRB ADHB	Rasio
2020	24.045,94	205.082,00	11,73%
2021	25.952,61	232.064,12	11,18%
2022	24.986,23	276.316,37	9,04%

Sumber : GFS, SIKRI, BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Jika kita lihat peran belanja pemerintah selama 3 tahun terakhir tidak banyak mengalami perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB dari sisi pengeluaran masih lebih didominasi oleh faktor konsumsi rumah tangga. Meskipun begitu, peran belanja pemerintah tetap sangat penting untuk menjaga ketahanan daya beli masyarakat dan sebagai stimulus perekonomian. Belanja pemerintah penting sebagai stabilisasi. Hal ini sangat terlihat ketika terjadi kenaikan inflasi belanja pemerintah mengambil peran sebagai shock absorber sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Hal ini terlihat di tahun 2022 ketika inflasi Provinsi Jambi lebih tinggi dibandingkan nasional, tingkat konsumsi masyarakat masih dapat tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi Provinsi Jambi. Belanja Pemerintah juga sangat penting sebagai stimulus untuk mendorong dampak multiplier aktifitas ekonomi. Hal ini pula yang mendorong agar realisasi Belanja Pemerintah harus didorong segera sejak awal tahun sehingga tidak harus selalu menumpuk di akhir tahun. Dengan adanya percepatan realisasi belanja Pemerintah sejak awal tahun maka momentum pertumbuhan ekonomi tetap dapat terjaga.

IV. Analisis Tata Kelola Keuangan Pusat dan Daerah

a. Matriks klasifikasi dan perbandingan peraturan terkait tata kelola keuangan daerah antar daerah

Tata kelola pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, transparan, dan produktif. Menurut *World Bank*, Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political *framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan yang menuju tata kelola yang baik terus membangun kultur budaya kerja yang transparan baik dari segi perlindungan kebebasan sosial, politik, maupun ekonomi, penyederhanaan birokrasi dan

organisasi, pemberdayaan/peningkatan peran pengusaha kecil, serta keterbukaan informasi. Untuk itu Pemerintah Daerah menerbitkan Regulasi yang ditujukan untuk terlaksananya hal tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipengaruhi oleh manajemen keuangan daerah yang baik. Manajemen keuangan daerah mendukung Visi dan Misi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

Untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan pemerintah daerah menyusun APBD, seluruh pemerintah daerah digunakan Suatu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah sarana bagi Pemerintah untuk mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan Keuangan Daerah sebagai sarana menunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan keuangan dengan membentuk unit/satuan kerja/badan/dinas khusus yang menangani pelaksanaan keuangan daerah seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ataupun Bagian Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah disetiap pemerintah daerah.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
Provinsi Jambi	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jambi
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Kabupaten Batanghari	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Batang Hari
	Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
	Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bungo	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
	Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Bungo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo
Kabupaten Kerinci	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Kerinci
	Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 34a Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci
	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
	Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci
	Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Kabupaten Merangin	Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Muaro Jambi	Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
	Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
	Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rician dana desa di kabupaten Muaro Jambi TA.2021
	Peraturan Bupati Muaro Jambi tebvNomor 64 Tahun 2021 tentang perubahan atas perbup nomor 84 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan pengalokasian alokasi dana desa setiap desa TA.2021
Kabupaten Sarolangun	Peraturan Daerah Kabupaten Sarolnagun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa
	Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam Kabupaten Sarolangun
	Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tebo	Perda BPHTB, Perda Pajak Air Tanah, Perda Pajak Hiburan Nomor 16 Tahun 2020_001, Perda Pajak Hiburan, Perda Pajak Hotel, Perda Pajak Pakir, Perda Pajak Reklame, Perda Pajak Reklame_001, Perda Pajak Restoran, Perda Pajak Sarang Burung Walet 2020, Perda Pajak Sarang Burung Walet, Perda PBB, Perda PMBLB, Perda PPJ, Perda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2020_001
	Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
	Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, Perbup Perubahan Ketiga Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo
	Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo
	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Jambi	Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Jambi
	Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jambi
Kota Sungai Penuh	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh
	Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh

b. Matriks perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan pusat dari peraturan pelaksanaan APBN

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik perlu didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih, untuk itu perlu dibuat aturan bagaimana berjalannya pemerintahan yang baik dengan penyelenggara pemerintah yang baik dan bersih. Pemerintah daerah se Provinsi Jambi selalu berusaha untuk mencapainya melalui penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan berpedoman juga pada Regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dari 12 Pemerintah Daerah yang ada di Jambi beberapa Peraturan daerah dan Peraturan Lain yang dapat di inventarisir yaitu:

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
Provinsi Jambi	Perda No. 1 Tahun 2022 Tanggal: 07-01-2022 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Batanghari	Perda No. 5 Tahun 2021 Tanggal: 24-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Bungo	Perda No. 11 Tahun 2021 Tanggal: 31-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Kerinci	Perda No. 4 Tahun 2021 Tanggal: 28-12-2020 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Merangin	Perda No. 14 Tahun 2021 Tanggal: 31-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Muaro Jambi	Perda No. 10 Tahun 2021 Tanggal: 28-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Sarolangun	Perda No. 8 Tahun 2021 Tanggal: 30-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Perda No. 13 Tahun 2021 Tanggal: 27-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perda No. 4 Tahun 2021 Tanggal: 29-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo	Perda No. 14 Tahun 2021 Tanggal: 21-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kota Jambi	Perda No. 16 Tahun 2021 Tanggal: 17-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kota Sungai Penuh	Perda No. 9 Tahun 2021 Tanggal: 30-12-2021 Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

V. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah

a. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah antar daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dimulai sejak tahun 2006. Opini LKPD se-provinsi Jambi pada Tabel di bawah menunjukkan mulai membaiknya kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2021.

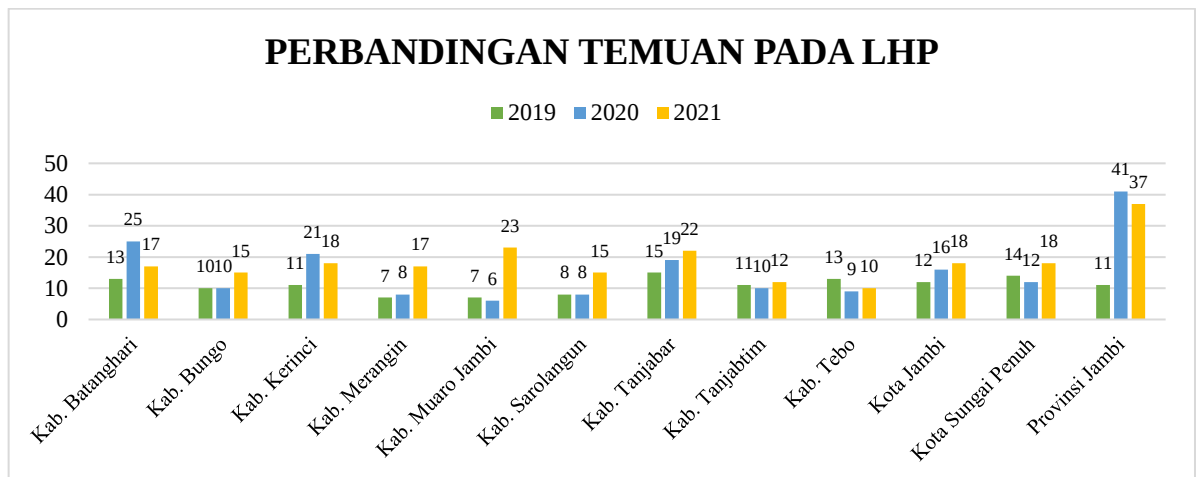
Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 11 Pemerintah Daerah telah berhasil mempertahankan opini WTP terhadap LKPD yang dihasilkan selama empat tahun berturut-turut. Sementara itu, ada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo kembali dapat meraih opini WTP setelah tahun 2020 memperoleh opini WDP.

Nomor	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Jambi	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Muaro Jambi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Batang Hari	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Tanjabbar	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tanjabtim	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Bungo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
8	Kabupaten Tebo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Merangin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Sarolangun	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Nomor	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Kota Sungai Penuh	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Kerinci	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Siaran Pers BPK Perwakilan Prov. Jambi

- b. Matriks perbandingan data temuan/catatan penting/rekomendasi BPK atas LKPD terkait pelaksanaan anggaran daerah dengan data temuan/catatan penting/ rekomendasi BPK atas LKPP



Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, temuan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 222 temuan. Untuk temuan tahun 2021, temuan paling banyak berada di Provinsi Jambi sejumlah 37 temuan. Rata-rata temuan pada tahun 2020 adalah sebanyak 15 temuan, sedangkan untuk tahun 2021 sebanyak 18 temuan. Klasifikasi temuan untuk masing-masing pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Batanghari (17 Temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan LK sebanyak 3 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 9 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 3 temuan
- 2) Kabupaten Bungo (15 Temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan LK sebanyak 2 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 8 temuan
 - c. Kelompok Kas sebanyak 3 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 1 temuan
 - e. Kelompok Investasi Jangka Panjang sebanyak 1 temuan
- 3) Kabupaten Kerinci (18 Temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan LK sebanyak 2 temuan

- b. Kelompok Pendapatan sebanyak 3 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 10 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 3 temuan
- 4) Kabupaten Merangin (17 Temuan)
 - a. Kelompok Pendapatan sebanyak 3 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 8 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 6 temuan
- 5) Kabupaten Muaro Jambi (23 Temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan LK sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 4 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 11 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 7 temuan
- 6) Kabupaten Sarolangun (15 Temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan LK sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 9 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 5 temuan
- 7) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (22 temuan)
 - a. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 11 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 9 temuan
- 8) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (12 temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan laporan keuangan sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 6 temuan
 - d. Kelompok Aset sebanyak 3 temuan
- 9) Kabupaten Tebo (10 temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan laporan keuangan sebanyak 1 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 1 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 8 temuan
- 10) Kota Jambi (18 temuan)
 - a. Kelompok Pendapatan sebanyak 5 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 8 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 5 temuan
- 11) Kota Sungai Penuh (18 temuan)
 - a. Kelompok Penyusunan laporan keuangan sebanyak 2 temuan
 - b. Kelompok Pendapatan sebanyak 2 temuan
 - c. Kelompok Belanja sebanyak 9 temuan

- d. Kelompok Aset sebanyak 5 temuan
- 12) Provinsi Jambi (37 temuan)
 - a. Kelompok Pendapatan sebanyak 4 temuan
 - b. Kelompok Belanja sebanyak 20 temuan
 - c. Kelompok Aset sebanyak 13 temuan

VI. Penutup

a. Kesimpulan

- 1) Capaian pembangunan dan ekonomi Provinsi Jambi pada 2021 dapat dikatakan mencapai prestasi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh dari 71,63% (2021) menjadi 72,14% (2022). Begitupula untuk gini ratio sedikit mengalami kenaikan dari 0,315 (2021) menjadi 0,335 (2022). Tingkat kemiskinan Kembali menurun dari 7,67% (2021) menjadi 7,7% (2022). Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2022 terus mengalami perbaikan, disatu sisi melebihi target RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 7,9%, namun disisi lain tingkat kemiskinan masih dibawah target apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RKPD 2022 yaitu sebesar 7,10%. Hal ini juga sejalan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,09% (2021) menjadi 4,59% (2022). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi berada di level 5,13% dan mengalami pertumbuhan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Inflasi gabungan Provinsi Jambi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional (5,51%) dengan didorong oleh kombinasi kenaikan kelompok komoditas makanan minuman, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta transportasi.
- 2) Kinerja APBN pada tahun 2022 cukup menggembirakan. Kenaikan harga CPO dan Batubara di pasar global turut mendorong penerimaan perpajakan sehingga mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Begitupula realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melebihi target yang telah ditetapkan ditopang oleh meningkatnya aktivitas masyarakat;
- 3) Secara keseluruhan, Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,83% apabila dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Terkontraksinya realisasi BPP disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran serta penurunan realisasi belanja modal dan belanja barang. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan tahun 2022 menjadi tahun terakhir defisit

APBN diperkenankan melebihi 3% PDB Nasional, sehingga seiring dengan perbaikan covid-19 terjadi normalisasi belanja pada fungsi kesehatan;

- 4) Kinerja APBD pada tahun 2022, dari sisi realisasi pendapatan PAD capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan catatan kinerja retribusi yang masih mempunyai ruang untuk dilakukan perbaikan. Dari sisi realisasi belanja, realisasi belanja tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2021 dengan catatan masih terjadi penumpukan realisasi belanja daerah di triwulan IV. Jumlah SILPA masih menunjukkan peningkatan dibandingkan jumlah SILPA tahun yang lalu.
- 5) Sektor unggulan memberikan kontribusi penerimaan perpajakan yang berbeda, dimana sektor pertambangan menyumbang penerimaan perpajakan yang signifikan sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan porsi penerimaan pajaknya cukup kecil. Hal ini disebabkan perbedaan tata kelola diantara dua sektor tersebut dimana rantai distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif masih sulit untuk dilakukan identifikasi subjek pajaknya;
- 6) Sektor potensial di Provinsi Jambi adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Sektor Real Estate. Serapan tenaga kerja pada sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor pada tahun 2022 sebanyak 272 ribu orang atau 14,49% dari jumlah 1,8 juta angkatan kerja di Provinsi Jambi dan merupakan sektor penyumbang pajak terbesar ketiga dari struktur penerimaan pajak per lapangan usaha tahun 2022 di Provinsi Jambi sebesar Rp868,81 miliar.

b. Saran

Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya untuk mengembangkan sektor sekunder agar memiliki kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan perekonomian selain sektor penopang utama perekonomian yaitu sektor primer. Pengembangan sektor sekunder diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dengan mentransformasi sumber-sumber ekonomi berbasis SDA menjadi komoditas yang lebih memiliki nilai. Dukungan dapat berjalan optimal dengan harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berjalan dengan baik, serta keselarasan pelaksanaan APBN dan APBD. Beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat:

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran:
 - a. Pelaksanaan proyek prioritas yang dilaksanakan oleh K/L, KPBU, BUMN (pemerintah pusat) perlu dinformasikan secara berkala terkait dengan target,

data, lokasi, dan tahapan yang telah dilaksanakan kepada BAPPEDA dan OPD terkait, agar bisa diselaraskan dengan rencana pembangunan di daerah;

- b. Diperlukan dukungan kebijakan untuk percepatan perwujudan kawasan industri Kualatungkal, Ujung Jabung serta Muara Sabak untuk mendukung hilirisasi produksi sektor-sektor unggulan di Provinsi Jambi;
- c. Dokumen RKP idealnya dapat ditetapkan sebelum dokumen RKPD sebagaimana halnya APBN ditetapkan sebelum APBD.

2. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah:

- a. Untuk mendukung optimalisasi potensi penerimaan di daerah perlu penguatan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang sudah ada antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah (misal: data luas perkebunan, data administrasi WP di pusat yang memiliki usaha di daerah);
- b. Dalam rangka perluasan basis data pajak, perlu penguatan pertukaran dan pemanfaatan data eksportir antara DJP dengan DJBC;
- c. Dalam rangka identifikasi potensi diperlukan alternatif pendekatan administrasi perpajakan berbasis aktivitas ekonomi.

3. Aspek Belanja Negara dan Daerah:

- a. Untuk menangkap dampak fiskal secara keseluruhan terhadap perekonomian regional, diperlukan identifikasi pelaksanaan belanja pemerintah berdasarkan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Penetapan pagu alokasi Dana Transfer khususnya alokasi Dana Desa per desa dapat ditetapkan segera setelah Undang-Undang APBN disetujui oleh DPR;
- c. Dalam rangka akselerasi pelaksanaan belanja modal khususnya yang bersifat konstruksi, tahapan perencanaan (konsultan perencana atau manajemen konstruksi) seyogyanya dilaksanakan t-1 sebelum penganggaran pelaksanaan pembangunan.

4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan

Untuk menangkap surplus/defisit riil dari kebijakan fiskal regional diperlukan data spasial pelaksanaan belanja baik belanja K/L atau belanja BUN yang pelaksanaannya dilaksanakan di daerah serta diperlukan data penerimaan negara berbasis lokasi aktivitas ekonomi.

Pemerintah Daerah:

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran:
 - a. Dalam pengembangan infrastruktur khususnya pembangunan jalan di Provinsi Jambi diperlukan keselarasan standar biaya, sehingga dapat diukur efisiensi antara pencapaian output dan biaya yang dibelanjakan;
 - b. Untuk pengembangan sektor pertanian, diperlukan kebijakan antara lain: (1) kepastian harga produk pertanian dengan pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG); (2) akselerasi belanja sektor pertanian berbasis data inflasi, ketersediaan stok pangan, harga komoditi global; dan (3) pengembangan produksi bahan substitusi komoditi pangan, contoh: bubuk cabai dan bawang;
 - c. Diperlukan forum untuk memastikan adanya kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
2. Aspek Pendapatan Negara dan Daerah:
 - a. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan langkah-langkah strategis yaitu identifikasi terhadap potensi sumber pendapatan dan perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak/retribusi melalui pemanfaatan TI untuk mendukung sistem yang terintegrasi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, perbaikan layanan, kepatuhan atas peraturan serta perbaikan peraturan pajak daerah/retribusi;
 - b. Melaksanakan akselerasi hilirisasi industri untuk mendorong kontribusi sektor sekunder dalam struktur perekonomian Provinsi Jambi.
3. Aspek Belanja Negara dan Daerah:
 - a. Untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan fungsi/urusan secara berkala bulanan yang dikoordinasikan oleh tim percepatan pelaksanaan anggaran daerah;
 - b. Melaksanakan rilis kinerja serapan anggaran secara periodik kepada masyarakat;
 - c. Melakukan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan anggaran daerah dan menetapkan sebagai indeks kinerja utama.
4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah daerah didorong untuk menekan besaran SILPA yang selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, untuk memastikan APBD yang dirancang ekspansif (defisit) dapat direalisasikan sebagai pendorong perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O; Johnson, D, Macroeconomics, Pearson
- Blöndal, J. R. 2001, 'Budgeting in Sweden', *OECD Journal on Budgeting*, vol. 1, no. 1, pp. 27-57.
- Dong Fu, Lori L Taylor, Mine K. Yucel (2003). Fiscal Policy and Growth. Research Departement Working Paper 0301.
- Irawan, M. Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6*. BFE-Yogyakarta: Yogyakarta
- N. Gregory Mankiw (2009). "Macroeconomics" Seventh Edition. Harvard University.
- Olivier Blanchard, David R. Johnson (2013). "Macroeconomics" Sixth Edition. Pearson Education Inc. 2013.
- Robert J. Barro and Xavier Sala-i-martin (2004). "Economic Growth" Second Edition. The MIT Press Cambridge, Massachusett.
- Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard (2011). "Macroeconomics" Eleventh Edition. McGraw-Hill International Editions
- Schick, A. 1996, 'The Spirit of Reform: managing the New Zealand state sector in a time of change', *Report prepared for the State Services Commission and the Treasury, Wellington, New Zealand*.
- Schick, A. 1998, 'Why most developing countries should not try New Zealand's reforms', *The World Bank Research Observer*, vol. 13, no. 1, pp. 123-131.
- Todaro, M.P, 1977, *Economics for a developing world : an introduction to principles, problems and policies for development*, Longman, London
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum



Kanwil Ditjen Perbendaharaan *Provinsi Jambi*

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Telanaipura, Kota Jambi, 36122

Telp. (0741) - 668802 | Fax. (0741) - 668801

Email: kanwil.jambi@gmail.com

Website: djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi